



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029

JAKARTA, 2025

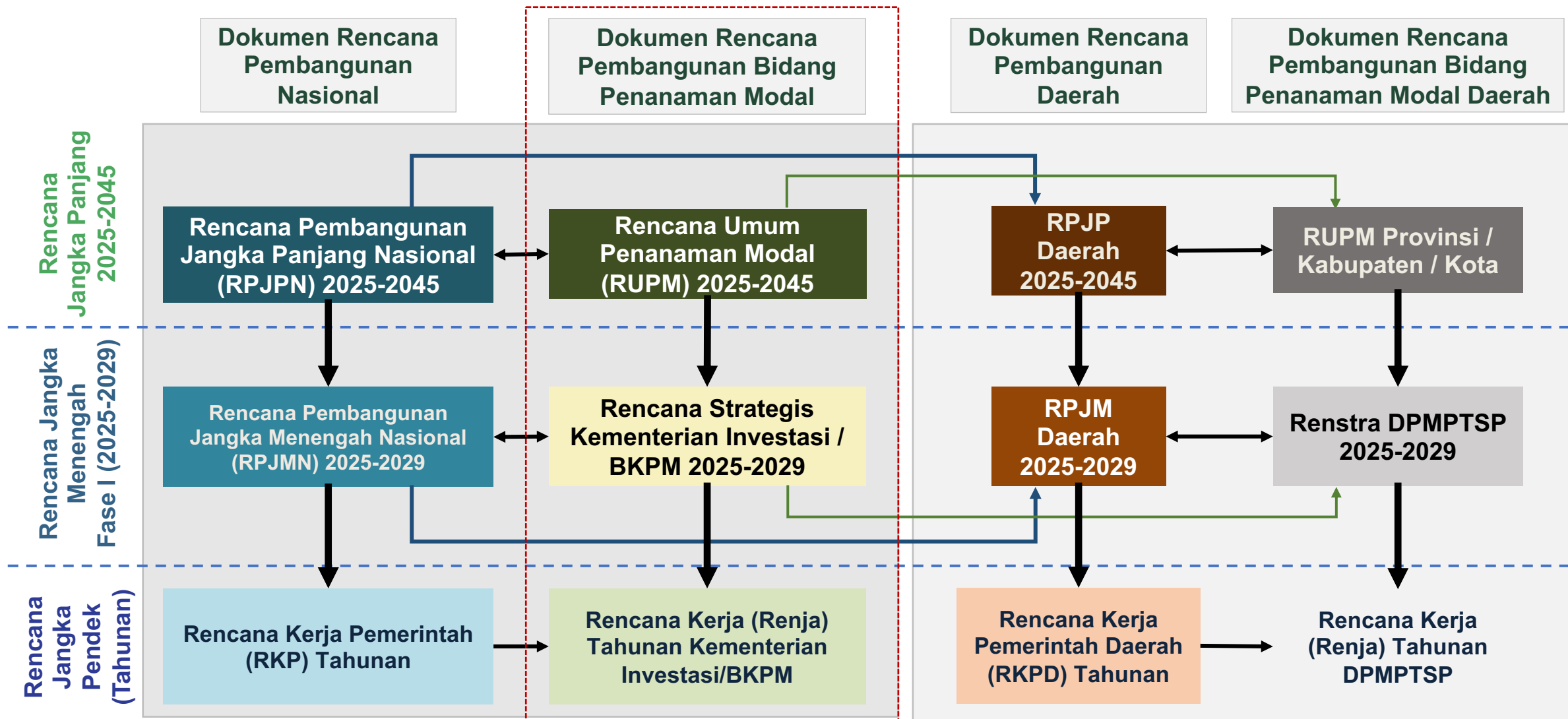


**Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju**



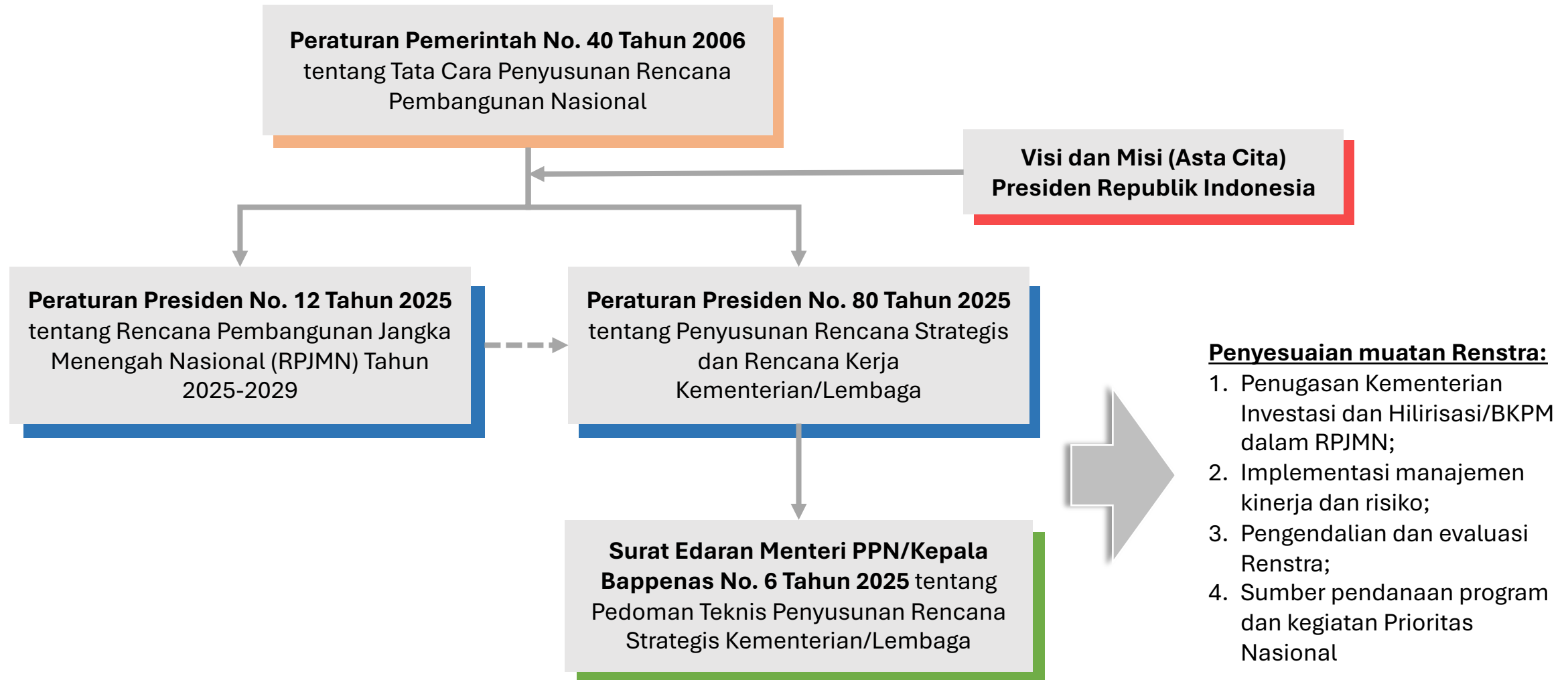
Posisi Dokumen Renstra dan RUPM

dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah



Catatan: Penyusunan RUPM Provinsi/Kabupaten/Kota mengacu pada dokumen RPJPD 2025-2045 dan RUPM 2025-2045, sementara penyusunan Renstra DPM-PTSP mengacu kepada RPJMD 2025-2029 dan Renstra BKPM 2025-2029 guna menjaga sinkronisasi dan keselarasan kebijakan penanaman modal pusat-daerah

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029



Timeline Penyusunan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029



Muatan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029

Berdasarkan Perpres No. 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Kondisi Umum
- 1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

- 2.1 Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- 2.2 Misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- 2.3 Tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- 2.4 Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- 3.3 Kerangka Regulasi
- 3.4 Kerangka Kelembagaan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1 Target Kinerja
- 4.2 Kerangka Pendanaan

BAB V

PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Lampiran 2:

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya
yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek
Prioritas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Lampiran 3:

Kerangka Regulasi



Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

dalam Rancangan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029

- ❑ Visi merupakan gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, gambaran konsistensi kinerja 5 (lima) tahun mendatang, serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- ❑ Kaidah perumusan Visi mengacu pada **Permen PPN/Bappenas No.10/2023** tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (**Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal**)

TERWUJUDNYA **PENANAMAN MODAL** YANG **TINGGI** DAN **BERKUALITAS** UNTUK **MENUJU INDONESIA EMAS 2045**

Mendorong pencapaian **realisasi penanaman modal yang lebih akseleratif** pada periode 2025-2029. Dalam hal ini, kinerja penanaman modal diharapkan dapat menjadi **engine of growth** pertumbuhan ekonomi nasional.

Penanaman Modal yang berkualitas adalah penanaman modal yang **Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata**

Visi yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029

- ☐ *Misi* merupakan gambaran mengenai rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi;
- ☐ *Misi* harus sejalan dengan upaya pencapaian Visi organisasi;
- ☐ *Misi* harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang terkait;
- ☐ *Misi* harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi Kementerian/Lembaga.

MENGAKSELERASI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL UNTUK INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

“**Mengakselerasi**” menunjukkan urgensi untuk mempercepat proses peningkatan investasi.

Hal ini penting karena investasi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Penanaman modal diharapkan dapat mendukung **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**.

Hal ini menekankan pentingnya mengembangkan pasar dalam negeri yang kuat dan terintegrasi. Misi ini juga bertujuan untuk memperluas pasar ke tingkat global, meningkatkan ekspor, dan menarik investasi asing. Indonesia diharapkan dapat menjadi bagian dari rantai nilai global yang lebih kompleks, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

Tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029

dalam Rancangan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029

- ☐ *Tujuan* merupakan penjabaran Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden;
- ☐ *Tujuan* harus sejalan dengan Visi dan Misi organisasi Kementerian/Lembaga pada periode jangka menengah;
- ☐ *Tujuan* harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
- ☐ *Tujuan* harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga;
- ☐ *Tujuan* harus dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kementerian/Lembaga.

MENINGKATNYA PENANAMAN MODAL YANG BERFOKUS PADA SEKTOR PRIORITAS TERMASUK HILIRISASI, BERORIENTASI EKSPOR, DAN BERBASIS KEWILAYAHAN

- ☐ Penanaman modal akan didorong pada **sektor investasi prioritas** yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan dapat berperan dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
- ☐ Penanaman modal juga difokuskan pada **hilirisasi investasi strategis** bidang perikanan dan kelautan, minyak bumi, gas bumi dan batubara, mineral, serta perkebunan dan kehutanan guna meningkatkan nilai tambah penanaman modal.
- ☐ Selain itu, penanaman modal juga akan ditekankan pada investasi yang **berorientasi ekspor** guna memperkuat neraca perdagangan Indonesia, meningkatkan devisa, dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro.
- ☐ Dalam hal kewilayahan, penanaman modal juga akan difokuskan pada **Kawasan Pusat Pertumbuhan**, seperti IKN, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ).
- ☐ **Indikator Tujuan** berupa total nilai PMA dan PMDN

Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029

dalam Rancangan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029

- ❑ *Sasaran Strategis* Kementerian/Lembaga (*Outcome/Impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program
- ❑ *Sasaran Strategis* Kementerian/Lembaga merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Kementerian/Lembaga;
- ❑ *Sasaran strategis* mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua Program dalam Kementerian/Lembaga
- ❑ *Sasaran Strategis* perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) Sasaran Strategis dapat didukung oleh lebih daripada 1 (satu) Sasaran Program;
- ❑ *Sasaran Strategis* Kementerian/Lembaga harus dirumuskan dengan jelas dan terukur Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata

Penanaman modal yang: (i) **Bernilai tambah**, ditandai dengan peningkatan capaian nilai realisasi penanaman modal di sektor sekunder serta di bidang hilirisasi; (ii) **Inklusif**, yaitu penanaman modal yang berdampak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas melalui Fasilitasi kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM termasuk UMKM dengan pelaku usaha disabilitas; (iii) **Berorientasi ekspor**, yaitu meningkatnya ekspor melalui kegiatan penanaman modal; (iv) **Merata**, yaitu penanaman modal yang lebih merata melalui peningkatan kontribusi penanaman modal di Kawasan Pusat Pertumbuhan dan di Luar Jawa

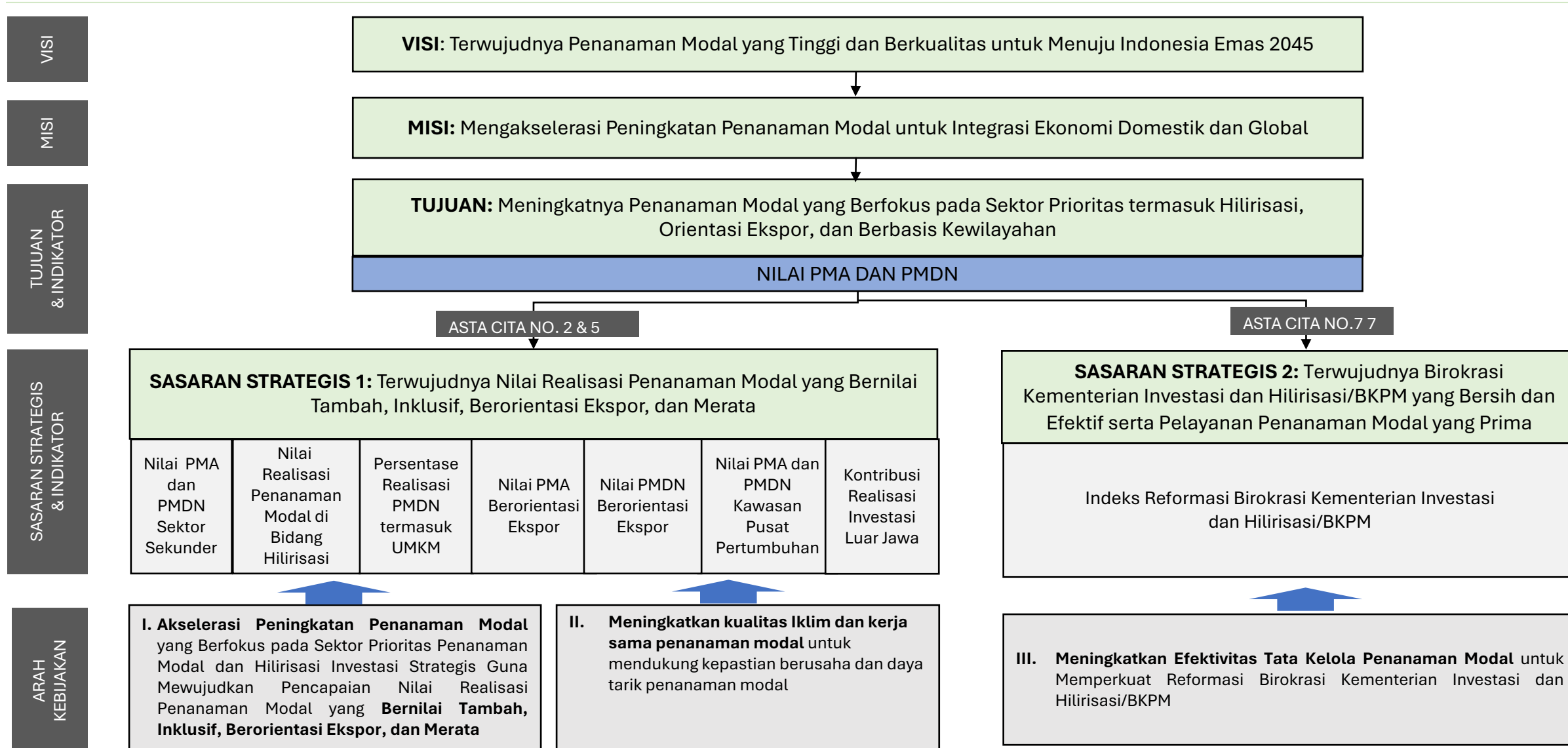
Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima

Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM yang bersih, yaitu ASN yang berakhlak dan profesional yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai survei *employer branding*, indeks berakhlak, dan penilaian integritas ASN.

Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang efektif, yaitu tata kelola penanaman modal yang akuntabel dan transparan, yang ditunjukkan oleh opini BPK atas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), keterbukaan informasi publik, reformasi hukum, digitalisasi arsip, dan tata kelola pengadaan

Pelayanan penanaman modal yang prima, yaitu kualitas pelayanan penanaman modal yang semakin meningkat berdasarkan survei Indeks Kepuasan Masyarakat.





Indikasi Risiko Sasaran Strategis

Identifikasi indikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.

Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Nilai PMA dan PMDN sektor sekunder	Potensi nilai PMA dan PMDN sektor sekunder menurun	1. Penyusunan daftar pelaku usaha potensial sektor sekunder agar dapat dilakukan pengawalan realisasi investasi secara bersama-sama dengan seluruh <i>stakeholders</i> terkait.	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
		2. Penguatan pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi investasi sektor sekunder yang lebih menarik bagi investor.	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
		3. Pengembangan sistem OSS secara rutin yang <i>user friendly</i> .	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
		4. Penyediaan informasi data proyek sektor sekunder dan ketersediaan lahan yang siap ditawarkan kepada Pelaku Usaha melalui koordinasi pihak terkait.	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Identifikasi indikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.

Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Nilai PMA dan PMDN sektor sekunder	Potensi nilai PMA dan PMDN sektor sekunder menurun	5. Peningkatan intensitas koordinasi dengan seluruh <i>stakeholders</i> terkait dalam mengoptimalkan potensi investasi sektor sekunder di Indonesia.	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		6. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha di antaranya: (a) optimalisasi implementasi sanksi ke jenjang tahapan yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajibannya sebagai penanam modal; dan (b) menggiatkan dan memperluas layanan klinik LKPM di tingkat daerah di seluruh Indonesia.	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.

Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi	Potensi nilai realisasi PMA/PMDN di bidang hilirisasi tidak tercapai	1. Percepatan penetapan Peraturan Presiden terkait hilirisasi.	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
		2. Pengawasan <i>roadmap</i> hilirisasi dan proyek investasi hilirisasi strategis.	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
		3. Penyediaan data informasi investasi hilirisasi strategis.	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
		4. Penguatan regulasi dan optimalisasi penerapan <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) bagi investasi bidang hilirisasi melalui koordinasi dengan kementerian teknis terkait maupun OPD di daerah.	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		5. Mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di lokasi prioritas hilirisasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait dan peningkatan investasi pada proyek infrastruktur.	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.

Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM	Potensi persentase realisasi PMDN termasuk UMKM tidak mencapai target	1. Penguatan kerja sama dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam meningkatkan kemudahan penetrasi pasar dan jaringan distribusi bagi UMKM.	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		2. Penguatan kapasitas UMKM melalui fitur kemitraan pada sistem OSS.	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
		3. Menjalin kerja sama kemitraan dengan PMA bagi pelaku usaha UMK yang memiliki NIB.	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		4. Penyediaan informasi untuk kegiatan investasi UMKM melalui koordinasi pihak terkait.	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.

Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Nilai PMA berorientasi ekspor Nilai PMDN berorientasi ekspor	Potensi nilai realisasi PMA dan PMDN berorientasi ekspor menurun	1. Diversifikasi pasar baru untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa negara tujuan ekspor.	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
		2. Meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara mitra untuk memastikan akses yang lebih baik dan negosiasi yang menguntungkan.	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
		3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelabuhan, logistik, dan transportasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah serta peningkatan investasi pada proyek infrastruktur.	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
		4. Mendorong peningkatan hasil produksi sesuai standar negara tujuan ekspor (seperti penggunaan EBT, ramah lingkungan, dan berkelanjutan).	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
		5. Penguatan regulasi dan optimalisasi penerapan <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) bagi investasi berorientasi ekspor melalui koordinasi dengan kementerian teknis terkait maupun OPD di daerah.	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		6. Pengawasan realisasi investasi proyek yang telah dilaksanakan MoU bilateral.	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.

Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan	Potensi nilai realisasi PMA dan PMDN kawasan pusat pertumbuhan menurun	1. Mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan pusat pertumbuhan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait dan peningkatan investasi pada proyek infrastruktur.	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
		2. Penguatan harmonisasi dan konsistensi kebijakan pada kawasan pusat pertumbuhan melalui koordinasi dengan kementerian teknis terkait maupun OPD di daerah.	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		3. Penyediaan data informasi pengelola beserta Pelaku Usaha (<i>tenant</i>) aktif di kawasan pusat pertumbuhan agar dapat dilakukan pengawalan realisasi investasinya.	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		4. <i>Debottlenecking</i> investasi mangkrak percepatan realisasi Pelaku Usaha (<i>tenant</i>) di kawasan pusat pertumbuhan.	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.

Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Kontribusi realisasi investasi luar Pulau Jawa	Investor potensial kurang berminat berinvestasi di luar Pulau Jawa	1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar di luar Jawa melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah serta peningkatan investasi pada proyek infrastruktur di luar Jawa.	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
		2. Peningkatan kapasitas SDM bidang perizinan di luar Jawa melalui pendampingan secara kontinyu, intensif, dan berorientasi hasil.	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
		3. Penguatan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan serta peningkatan diseminasi kebijakan di luar Jawa melalui koordinasi dengan kementerian teknis terkait maupun OPD di daerah.	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		4. Penyediaan informasi proyek dan ketersediaan lahan yang siap ditawarkan di luar Jawa melalui koordinasi secara intensif dengan pihak terkait.	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
		5. Asistensi pada kendala Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dihadapi Pelaku Usaha potensial dengan dukungan dari seluruh unit Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran Strategis 2:

Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima.

Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak mencapai target	1. Optimalisasi penerapan <i>reward and punishment</i> terhadap kinerja ASN. 2. Peningkatan kompetensi ASN terkait penerapan teknologi baru, pemahaman tata kelola yang modern, dan manajemen perubahan. 3. Penguatan alokasi anggaran berbasis hasil dan peningkatan kerja sama multi pihak dalam mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 4. Optimalisasi pendeteksian dan pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penguatan audit dan pengawasan internal serta peningkatan integritas ASN. 5. Penguatan monitoring dan evaluasi pencapaian reformasi birokrasi, di antaranya melalui: a) penyusunan <i>timeline</i> pelaksanaan penilaian indikator Reformasi Birokrasi, dan (b) koordinasi secara berkala dengan kementerian/lembaga terkait.	Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama

Regulasi/Peraturan terkait Manajemen Risiko:

1. **Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2017** tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. **Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 128 Tahun 2025** tentang Penetapan Peta Risiko di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Arah Kebijakan dan Strategi

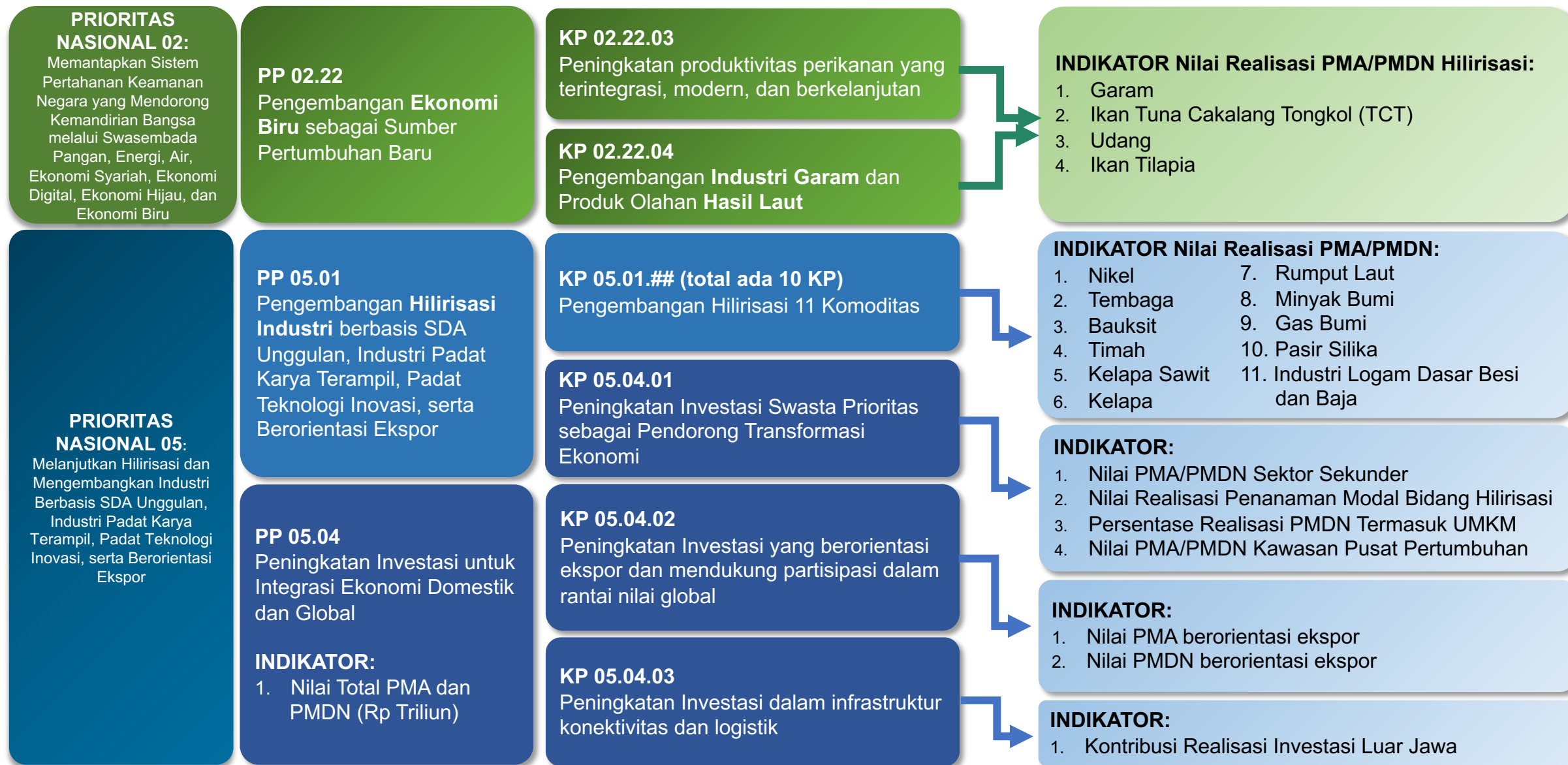
Kebutuhan Investasi Rp 13.032,79 T pada 2025-2029

Dalam Mendukung Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen



Target Presiden Prabowo:
Pertumbuhan Ekonomi 8%





Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam RPJMN (1/2)

Tujuan	Indikator Tujuan 2025-2029	Satuan	Baseline 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Penanaman Modal yang Berkualitas melalui Peningkatan Penanaman Modal di Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan	Nilai PMA dan PMDN	Rp Triliun	1.418,9*	1.905,6	2.175,3	2.567,5	2.969,6	3.414,8



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2025-2029	Satuan	Baseline 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata	Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder	Rp Triliun	596,3*	855,9	1.006,5	1.226,2	1.456,9	1.718,3
	Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM	Persen	47,6*	48,3	48,5	49,0	49,3	49,7
	Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan	Rp Triliun	253,4*	307,1	346,8	401,0	452,9	507,2
	Nilai PMA Berorientasi Ekspor	Rp Triliun	115,4*	171,6	205,3	253,6	306,4	367,4
	Nilai PMDN Berorientasi Ekspor	Rp Triliun	41,2*	60,4	71,9	88,3	106,0	126,4
	Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa	Persen	51,5	52,1	52,4	52,7	52,9	53,2
	Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	Rp Triliun	407,8	521,4	586,6	675,6	779,3	901,6
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	Indeks	76,12	76,20	77,34	78,50	79,68	80,88

Keterangan:

*) Baseline tahun 2023

• Target 2025 & 2029 bersumber dari Lampiran III Perpres No. 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, sementara target 2026-2028 bersumber dari paparan final Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam RPJMN (2/2)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan 2025-2029	Satuan	Baseline 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis komoditas prioritas	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit	Rp Triliun	44,09	1,49	1,66	1,85	2,06	2,30
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Kelapa	Rp Triliun	4,49	0,39	0,45	0,53	0,61	0,71
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Rumput Laut	Rp Triliun	0,23	0,51	0,53	0,56	0,58	0,61
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Garam	Rp Triliun	2,28	7,38	8,62	10,08	11,78	13,77
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Ikan TCT	Rp Triliun	0,22	0,60	0,61	0,62	0,62	0,63
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Tilapia	Rp Triliun	0,08	0,45	0,52	0,61	0,71	0,83
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Udang	Rp Triliun	0,66	0,40	0,46	0,53	0,61	0,70
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Minyak Bumi	Rp Triliun	17,46	34,45	39,84	45,23	50,62	56,01
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Gas Bumi	Rp Triliun	16,11	20,23	23,40	26,56	29,73	32,89
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Nikel	Rp Triliun	113,70	44,1	55,20	69,08	86,46	108,21
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Bauksit	Rp Triliun	10,79	11,78	12,87	14,05	15,34	16,75
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Tembaga	Rp Triliun	46,72	45,93	48,08	50,32	52,67	55,13
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Timah	Rp Triliun	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan Baja	Rp Triliun	9,60	10,17	10,77	11,40	12,07	12,78
	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Hilirisasi Pasir Silika	Rp Triliun	1,29	1,42	1,56	1,72	1,89	2,08

Keterangan:

- Target 2025 & 2029 bersumber dari Lampiran III Perpres No. 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, sementara target 2026-2028 bersumber dari paparan final Kementerian PPN/Bappenas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	UNIT KERJA PENGAMPU
Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata	1. Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder	Arah Kebijakan I: Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata	Menguatkan kebijakan perencanaan penanaman modal dengan sinergi kebijakan perencanaan lintas sektor	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan	Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
	2. Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi				Indeks kualitas perencanaan arah kebijakan penanaman modal	
	3. Persentase Realisasi PMDN termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)				Indeks kualitas penyusunan potensi/peleuang penanaman modal sektoral	
	4. Nilai PMA Berorientasi Ekspor		Pelaksanaan kegiatan promosi yang fokus dan terarah (<i>targeted</i>)	Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal untuk Mendukung Peningkatan Iklim Penanaman Modal	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan fasilitasi rencana pengembangan penanaman modal	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
	5. Nilai PMDN Berorientasi Ekspor			Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	Nilai Rencana Penanaman Modal	
	6. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan		Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal	Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan penanaman modal dan Hilirisasi yang Efektif	Persentase investor potensial yang memperoleh Nomor Induk Berusaha dan/atau Nomor Kegiatan Berusaha	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	7. Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa				Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	
					Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko	
			Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya			
			Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS)	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal		
	Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanan dan insentif perpajakan)					
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat				

Dukungan Pencapaian Sasaran Strategis

Dari Masing-Masing Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (2/4)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	UNIT KERJA PENGAMPU
Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata	1. Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder	Arah Kebijakan I: Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata	Mengoptimalkan penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	Persentase rencana aksi strategi dan tata kelola di bidang hilirisasi yang ditindaklanjuti	Deputi Bidang Hilirisasi
	2. Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi		Meningkatkan tata kelola teknologi informasi yang handal untuk mewujudkan pelayanan penanaman modal yang prima	Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis	Persentase capaian realisasi hilirisasi investasi strategis	Investasi Strategis
	3. Persentase Realisasi PMDN termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)			Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal	Deputi Bidang Teknologi Informasi
	4. Nilai PMA Berorientasi Ekspor			Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman Modal	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi	Penanaman Modal
	5. Nilai PMDN Berorientasi Ekspor					
	6. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan					
	7. Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa					

Dari Masing-Masing Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (3/4)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	UNIT KERJA PENGAMPU
Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata	1. Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder	Arah Kebijakan II: Meningkatkan kualitas Iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal	1. Penyederhanaan perizinan berusaha, harmonisasi kebijakan lintas sektor, dan kebijakan insentif penanaman modal yang tepat sasaran	Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	2. Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi		2. Mendorong UMKM naik kelas untuk meningkatkan kemandirian penanaman modal dalam negeri		Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM	
	3. Persentase Realisasi PMDN termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)		3. Mendukung pemetaan potensi penanaman modal di daerah untuk meningkatkan pemerataan penanaman modal		Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah	
	4. Nilai PMA Berorientasi Ekspor		Meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal untuk meningkatkan peran dalam Global Production Network (GPN) dan Global Value Chain (GVC) serta meningkatkan akses pasar ekspor	Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal	Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
	5. Nilai PMDN Berorientasi Ekspor				Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti	
	6. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan				Persentase DPMPSTP dan K/L yang berkategori baik dalam penilaian kinerja	
	7. Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	UNIT KERJA PENGAMPU
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	Arah Kebijakan III: Meningkatkan efektivitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola penanaman modal	Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel dan Transparan	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama
					Opini BPK Atas Laporan Keuangan	
					Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
					Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	
					Indeks Reformasi Hukum	
					Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	
					Nilai Evaluasi Kelembagaan	
			Meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang berintegritas dan profesional untuk mendukung tata kelola dan pelayanan penanaman modal yang berkualitas	Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional	Nilai Sistem Merit	
				Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Berakhlak dan Profesional		



Target Kinerja

Ada 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada periode 2025-2029, yaitu:
(1) Program Penanaman Modal dan Hilirisasi dan (2) Program Dukungan Manajemen

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas perencanaan umum dan perencanaan strategis penanaman modal serta perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan	Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan	Indeks	4,3 (Skala 5)	3,40 (Skala 4)	3,41 (Skala 4)	3,42 (Skala 4)	3,43 (Skala 4)	3,44 (Skala 4)
	Indeks kualitas perencanaan arah kebijakan penanaman modal	Indeks	4,3 (Skala 5)	3,40 (Skala 4)	3,41 (Skala 4)	3,42 (Skala 4)	3,43 (Skala 4)	3,44 (Skala 4)
	Indeks kualitas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral	Indeks	4,3 (Skala 5)	3,40 (Skala 4)	3,41 (Skala 4)	3,42 (Skala 4)	3,43 (Skala 4)	3,44 (Skala 4)
Meningkatnya kualitas layanan perencanaan penanaman modal untuk mendukung peningkatan iklim penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan fasilitasi rencana pengembangan penanaman modal	Indeks	4,3 (Skala 5)	3,40 (Skala 4)	3,41 (Skala 4)	3,42 (Skala 4)	3,43 (Skala 4)	3,44 (Skala 4)

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	Nilai rencana penanaman modal	Rp (Triliun)	2.065,50	3.343,16	3.816,25	4.504,33	5.209,89	5.990,91
	Persentase investor potensial yang memperoleh Nomor Induk Berusaha dan/atau Nomor Kegiatan Usaha	Persen	N/A	50,00	50,00	50,10	50,10	50,20

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif	Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi	Persen	N/A	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
	Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko	Persen	N/A	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya	Persen	N/A	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya pelayanan perizinan dan fasilitasi berusaha yang optimal	Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Persen	15,00	15,00	15,01	15,02	15,03	15,04
	Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanan dan insentif perpajakan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat	Indeks	3,50 (Skala 4)	3,55 (Skala 4)	3,57 (Skala 4)	3,60 (Skala 4)	3,62 (Skala 4)	3,65 (Skala 4)

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	Persentase rencana aksi strategi dan tata kelola di bidang hilirisasi yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
Meningkatnya realisasi PMA/ PMDN hilirisasi investasi strategis	Persentase capaian realisasi hilirisasi investasi strategis	Persen	N/A	60,00	60,50	61,00	61,50	62,00

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas tata kelola teknologi informasi penanaman modal	Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal	Persen	N/A	59,00	59,00	62,00	62,00	65,00
Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi penanaman modal	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi modal	Indeks	3,41 (Skala 4)	3,41 (Skala 4)	3,42 (Skala 4)	3,43 (Skala 4)	3,44 (Skala 4)	3,45 (Skala 4)

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
	Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM	Persen	N/A	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Profil Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah	Persen	N/A	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya implementasi kerja sama penanaman modal	Persentase Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal dalam dan luar negeri yang disepakati	Persen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama di bidang Penanaman Modal yang telah ditindaklanjuti	Persen	N/A	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00
	Persentase DPMPTSP dan K/L yang berkategori baik dalam penilaian kinerja	Persen	74,60	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya tata kelola yang akuntabel dan transparan	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,67	3,67	3,7	3,73	3,76	3,8
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai (Kategori)	76,78 (BB)	76,78 (BB)	77,16 (BB)	77,54 (BB)	77,91 (BB)	78,29 (BB)
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Nilai (Kategori)	83,91 (Baik/4)	84,36 (Baik/4)	86,62 (Baik/4)	87,75 (Baik/4)	88,88 (Baik/4)	90,01 (Sangat Baik/5)
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,96 (Skala 100)	90,00 (Skala 100)	98,97 (Skala 100)	98,98 (Skala 100)	98,98 (Skala 100)	98,99 (Skala 100)
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	Indeks	2,70 (Skala 4)	2,70 (Skala 4)	2,80 (Skala 4)	3,00 (Skala 4)	3,20 (Skala 4)	3,40 (Skala 4)
Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	88,09	89,00	89,25	89,50	89,75	90,00
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berakhlak dan profesional	Nilai Sistem Merit	Nilai	285	285	290	295	300	300

Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Unit Eselon I	Kerangka Pendanaan				
	2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM PENANAMAN MODAL DAN HILIRISASI	341.322.673.450	1.466.024.335.183	1.564.246.403.775	1.677.622.146.171	1.969.268.520.558
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	30.577.373.000	184.041.737.650	201.862.136.400	218.068.603.200	233.911.759.250
Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	16.880.337.250	49.999.891.250	52.585.190.500	55.379.905.000	57.080.656.500
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	84.596.020.000	206.925.985.000	222.999.313.500	242.026.912.675	416.050.036.209
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	64.184.300.000	227.744.154.839	261.755.782.882	272.681.675.926	291.600.256.873
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	17.363.250.200	90.304.494.350	114.183.920.800	143.964.611.250	193.113.154.520
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	21.933.244.500	61.902.625.000	66.246.600.000	70.114.992.500	74.464.423.000
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	28.006.336.500	107.334.110.094	89.379.464.913	101.854.547.895	110.336.625.974
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	77.781.812.000	537.771.337.000	555.233.994.780	573.530.897.725	592.711.608.231
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	409.241.612.000	561.127.978.663	603.469.020.194	635.347.904.327	657.396.067.081
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	409.241.612.000	561.127.978.663	603.469.020.194	635.347.904.327	657.396.067.081
TOTAL	750.564.285.450	2.027.152.313.846	2.167.715.423.969	2.312.970.050.499	2.626.664.587.639

Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 akan dilakukan setiap tahun untuk menilai capaian kinerja yang ditetapkan.

Pengendalian

- a. Pengendalian atas penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dilaksanakan melalui **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** dengan berpedoman pada:
 - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
 - Peraturan Kepala BKPM No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BKPM.
- b. Mekanisme SPIP di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dikoordinasikan oleh Inspektorat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai penjamin kualitas dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai evaluator dalam penilaian tingkat maturitas SPIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Penilaian Maturitas SPIP tersebut diatur melalui Peraturan Kepala BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- c. Pengendalian setiap indikasi risiko juga telah dipetakan pada level indikator kinerja pada program ataupun kegiatan melalui **Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 128 Tahun 2025 tentang Penetapan Peta Risiko di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM**.

Evaluasi

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 dilakukan untuk mengetahui capaian target serta menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari program dan kegiatan yang telah disusun.
- b. Mekanisme evaluasi tersebut dilakukan dengan pembuatan **Laporan Kinerja** (Lkj) Tahunan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Selain itu, juga dilakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja yang dikooordinir oleh Biro Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas setiap triwulan.



Terima Kasih

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto, No.44 Jakarta 12190 – Indonesia

T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id



LAMPIRAN

Kondisi Umum

- ❑ Memuat pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Periode sebelumnya
- ❑ Terdapat tiga sasaran strategis dan tujuh indikator kinerja utama pada Renstra 2020-2024
- ❑ Ketiga sasaran strategis tersebut meliputi: (1) Meningkatnya realisasi penanaman modal (SS-1); (2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (SS-2); (3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS-3).

Sasaran Strategis 1- Meningkatnya realisasi penanaman modal (SS-1)

Sasaran Strategis Pertama (SS-1)		Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata	Kategori
IKU	Nilai realisasi penanaman modal	Rp triliun	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3	826,3	901,0	1.207,2	1.418,9	1.714,2	101	105	125	129	138	120	Sangat Baik
	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder	Rp triliun	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1	272,9	325,4	497,7	596,3	721,3	120	121	141	123	112	123	Sangat Baik
	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	Persen	48,3	49,0	49,7	50,6	51,7	50,5	52,0	52,7	51,5	52,2	105	106	106	102	101	104	Sangat Baik
	Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM	Persen	48,8	49,7	50,3	51,9	53,1	50,1	49,6	45,8	47,6	47,5	103	100	91	92	89	95	Sangat Baik
Total Capaian													107	108	116	111	110	110	
													Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, diolah

Kondisi Umum (2/2)

Sasaran Strategis 2- Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (SS-2)

Sasaran Strategis Kedua (SS-2)		Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata	Kategori
IKU	Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>)	Peringkat	60	56	51	45,0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>World Competitiveness Institute for Management Development (IMD)</i>	Peringkat				45	40			44	34	27			102%	118%	120%	113%	Sangat Baik

Sasaran Strategis 3- Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS-3)

Sasaran Strategis Ketiga (SS-3)		Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)						
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata	Kategori
IKU	Nilai reformasi birokrasi BPKM	Predikat (Nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	BB (77.66)	BB (77.89)	BB (78.20)	BB (71,91)	BB (76,12)	100	100	98	90	95	97	Baik
	Opini BPK atas laporan Keuangan BKPM	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100	100	Sangat Baik
	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	BB (75,27)	BB (75,55)	BB (75,78)	BB (76,17)	BB (76,78)	101,1	101,7	94,4	94,7	96,0	97,6	Baik
	Penilaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM	Level	3	3	3	3	3,5	3	3	3	3	3	3,67	100	100	100	100	105	101
Total Capaian													100,3	100,4	98,1	96,2	99,0	98,9	Baik
													Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	

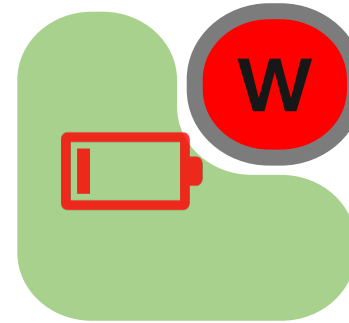
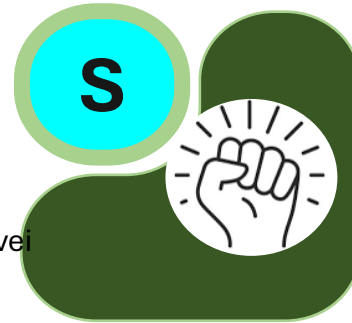


Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Tantangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Tantangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Kekuatan (*strengths*)

1. Adanya penguatan kelembagaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM
2. Semakin meningkatnya kepercayaan investor dan realisasi penanaman modal
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun berbagai peta dan peluang investasi
4. Meningkatnya peringkat Indonesia di berbagai survei lembaga persepsi investasi internasional

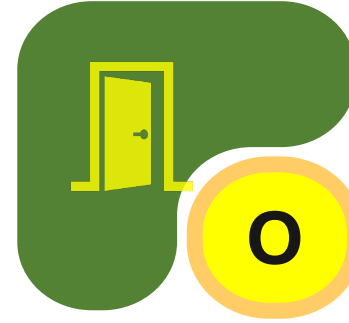
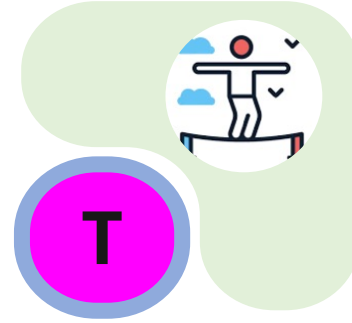


Kelemahan (*weaknesses*)

1. Daya saing lingkungan bisnis di Indonesia belum sepenuhnya kompetitif
2. Reformasi Birokrasi yang belum sesuai dengan harapan
3. Keefektifan investasi masih rendah (Skor ICOR tinggi)
4. Masih adanya ketimpangan investasi antar wilayah dan nilai investasi yang belum sepenuhnya fokus pada sektor prioritas, termasuk sektor hilirisasi, riset dan inovasi, dan industri manufaktur berorientasi ekspor
5. Proporsi UMKM dalam nilai investasi yang relatif masih kecil meskipun jumlah UMKM sangat banyak

Tantangan (*threats*)

1. Kurang menentunya kondisi ekonomi global dan kebutuhan investasi semakin meningkat termasuk pemenuhan target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029
2. Terbatasnya keterkaitan ekonomi antar wilayah (Infrastruktur, Konektivitas, Logistik) sehingga integrasi ekonomi domestik belum dapat optimal
3. Deindustrialisasi dini dan ekspor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang
4. Hilangnya daya tarik insentif akibat GMT dan adanya kebijakan proteksionisme di pasar global
5. Tantangan perubahan iklim global dan masih minimnya pengembangan EBT di Indonesia
6. Produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah dan kesenjangan ketrampilan tenaga kerja



Peluang (*opportunities*)

1. Modal dasar Indonesia yang kuat, termasuk ketersediaan sumber daya alam yang melimpah
2. Adanya berbagai pusat kawasan pertumbuhan dapat menjadi potensi penanaman modal
3. Adanya berbagai *stakeholders* untuk berkolaborasi dalam peningkatan investasi
4. Menguatnya *Global Production Network* dan *Global Value Chain*
5. Potensi EBT dan ekonomi hijau yang besar.
6. Posisi Indonesia dalam FDI yang masih stabil dan kuat diantara negara ASEAN

Perlunya mendorong investasi yang tinggi dan berkualitas dengan mengoptimalkan faktor kekuatan dan memanfaatkan faktor peluang secara optimal



Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Arah Kebijakan I: Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata. Strategi untuk melaksanakan Arah Kebijakan I adalah:

1. Memperkuat kebijakan perencanaan penanaman modal dengan sinergi kebijakan perencanaan lintas sektor, melalui:

- a. Perencanaan kebijakan di sektor prioritas penanaman modal terutama pada sektor energi baru terbarukan, ketahanan pangan, ekonomi digital & data center, industri manufaktur berorientasi ekspor, kesehatan, Ibu Kota Nusantara (IKN), serta pendidikan dan vokasi. Perencanaan kebijakan di antaranya dilakukan dengan pelaksanaan kajian, analisis kekuatan dan kelemahan dari sektor-sektor prioritas, serta penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal.
- b. Penguatan perencanaan kebijakan makro penanaman modal, di antaranya (i) penguatan kebijakan umum penanaman modal di daerah dengan melakukan pendampingan penyusunan RUPM Provinsi/Kabupaten/Kota; (ii) pengawalan pencapaian kebijakan jangka menengah melalui evaluasi dokumen Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029; (iii) analisis strategis rencana pengembangan penanaman modal, di antaranya melakukan kajian perekonomian global dan Indonesia serta dampaknya terhadap investasi di Indonesia beserta segala aspeknya; (iv) pengkajian berbagai aspek investasi dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia untuk mendorong akselerasi implementasi investasi prioritas; dan (v) perencanaan pendanaan investasi prioritas mencakup potensi pendanaan internasional untuk investasi yang berkelanjutan (World Bank, IMF, JICA, dll) dalam rangka mendorong percepatan pendanaan investasi prioritas/berkelanjutan.
- c. Meningkatkan potensi dan peluang penanaman modal di sektor prioritas. Beberapa yang perlu dilakukan yaitu (a) Pemetaan jenis investasi indikatif berbasis kebutuhan investor (investors need) dan pemetaan calon investor potensial dalam negeri dan luar negeri; (b) Pemetaan lahan potensial (potensial land) investasi secara menyeluruh dengan melibatkan peran aktif Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah; (c) Perancangan skema insentif dan kerja sama pemanfaatan lahan investasi dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan clean and clear dan mendukung kepastian berusaha; (d) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Pemerintah Daerah agar memiliki keseragaman dalam penyusunannya; (e) Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal terutama di kawasan pusat pertumbuhan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perguruan tinggi, pihak swasta, dan pemerintah daerah; (f) Penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan; dan (g) Penyiapan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) dan pengembangan video promosi yang lebih menarik, di antaranya video *construction time lapse*.
- d. Penguatan kolaborasi dan fasilitasi kebijakan penanaman modal proyek KPBU dan Kawasan Pusat Pertumbuhan dalam rangka mendukung percepatan penyelesaian masalah strategis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan percepatan pelaksanaan proyek kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

2. Pelaksanaan kegiatan promosi yang fokus dan terarah (*targeted*), melalui:

- a. Penguatan *branding* citra positif penanaman modal di Indonesia.
- b. Pendeteksian investor dan negara potensial di sektor prioritas penanaman modal (*market intelligence*) yang dilakukan di antaranya untuk merumuskan strategi promosi.
- c. Diseminasi serta penyebaran informasi peluang dan proyek investasi prioritas di kegiatan/forum investasi tingkat nasional dan internasional.
- d. Pemasaran investasi yang sesuai dengan sektor prioritas, termasuk peningkatan promosi investasi untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi di kawasan pusat pertumbuhan.
- e. Penyelenggaraan forum investasi tingkat nasional dan internasional, termasuk dalam rangka mempromosikan peluang investasi di Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN.
- f. Perluasan promosi penanaman modal dengan mengoptimalkan peran aktif Kedubes/Atase/Pusat Promosi Investasi di negara potensial, jaringan diaspora Indonesia, instansi/lembaga terkait, asosiasi pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk melakukan promosi penanaman modal.
- g. Pengawasan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah.

3. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal, melalui:

- a. Fasilitasi permasalahan investasi termasuk pelaku usaha (*debottlenecking*). *Debottlenecking* permasalahan investasi di antaranya terkait pemasalahan: (i) persetujuan pelepasan kawasan hutan; (ii) permasalahan tumpang tindih lahan; (iii) *abnormality* penyaluran gas; (iv) permasalahan proses AMDAL; dan (v) fasilitasi atas masyarakat sekitar yang terdampak dari pengembangan proyek prioritas.
- b. Percepatan realisasi penanaman modal proyek strategis nasional (PSN).
- c. Pengawasan penanaman modal berbasis risiko.
- d. Mengoptimalkan pendataan, pengawasan, dan pembinaan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau melaporkan LKPM.
- e. Mengawal eksekusi dan fasilitasi proyek untuk mendukung percepatan realisasi investasi.

4. Meningkatkan kualitas sosialisasi, pelayanan, dan penyelesaian masalah perizinan berbasis risiko, melalui:

- a. Penguatan OSS sebagai platform tunggal perizinan.
- b. Penguatan Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di daerah.
- c. Membuka layanan khusus untuk investasi yang bergerak di sektor hilirisasi dan industrialisasi serta di kawasan pusat pertumbuhan.
- d. Fasilitasi pemanfaatan fasilitas dan insentif penanaman modal.
- e. Peningkatan kualitas layanan perizinan termasuk kebijakan fiktif positif dan transparansi layanan. Implementasi fiktif positif terutama dalam hal persetujuan teknis tidak terbit sesuai waktu yang ditetapkan dalam Service Level Agreement (SLA), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terbit secara otomatis oleh sistem (fiktif positif).
- f. Percepatan perizinan berusaha di KEK/KI tertentu agar pembangunan konstruksi dapat dilakukan bersamaan dengan pengurusan persetujuan PBG.
- g. Implementasi dan promosi percepatan perizinan berusaha, termasuk percepatan layanan pendampingan perizinan berusaha untuk investasi luar negeri (FDI/PMA) strategis, peningkatan layanan dan fasilitasi investasi yang berorientasi riset dan inovasi, dan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan perizinan berusaha di kawasan pusat pertumbuhan.
- h. Meningkatkan kualitas berbantuan perizinan penanaman modal di bidang hilirisasi, melalui: (a) Layanan berbantuan perizinan investasi hilirisasi strategis, berupa fasilitasi perizinan berusaha; (b) Layanan berbantuan perizinan berusaha; dan (c) Layanan berbantuan Fasilitas berusaha.

5. Mengoptimalkan penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam, melalui:

- a. Penguatan dukungan kebijakan perencanaan di sektor hilirisasi investasi strategis untuk meningkatkan minat investor. Penguatan perencanaan kebijakan bidang hilirisasi, di antaranya (i) pengkajian dan penyusunan rencana aksi hilirisasi investasi strategis di sektor perikanan dan kelautan, minyak bumi, gas bumi dan batubara, mineral, serta perkebunan dan kehutanan; (ii) Penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan investasi berkelanjutan untuk mendukung hilirisasi; dan (iii) penyusunan rekomendasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan strategi dan tata kelola di bidang hilirisasi investasi strategis. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi dan peningkatan kualitas kebijakan di sektor perikanan dan kelautan, minyak bumi, gas bumi dan batubara, mineral, serta perkebunan dan kehutanan untuk mendukung akselerasi penanaman modal di bidang hilirisasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi strategis tahun 2023-2040. Untuk menjamin konsistensi implementasi jangka panjang serta integrasi dan sinkronisasi kebijakan nasional di bidang hilirisasi investasi strategis, peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi strategis perlu memiliki kepastian hukum dan kekuatan regulasi. Dalam rangka pemberian legitimasi hukum yang kuat, perlu dilakukan penetapan peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi strategis melalui Peraturan Presiden. Dalam tata peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden memiliki kedudukan di atas Peraturan Menteri serta dapat mengatur lintas sektor secara langsung. Dalam Peraturan Presiden tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perlu penegasan peran sebagai leading sector pelaksanaan berbagai kebijakan dan sebagai koordinator untuk melaksanakan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis di bidang hilirisasi investasi strategis.

5. Mengoptimalkan penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam, melalui:

- a. Meningkatkan potensi dan peluang penanaman modal di sektor hilirisasi. Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal di sektor hilirisasi melalui komunikasi secara intensif dengan pemerintah daerah/pelaku usaha/perusahaan/ asosiasi di setiap industri yang ada baik nasional maupun internasional. Selain itu, perlu dilakukan penyiapan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) sektor hilirisasi di sektor perikanan dan kelautan, minyak bumi, gas bumi dan batubara, mineral, serta perkebunan dan kehutanan.
- b. Mengoptimalkan kegiatan promosi yang fokus dan terarah (*targeted*) untuk meningkatkan nilai rencana penanaman modal di bidang hilirisasi, melalui:
 - Orientasi promosi dalam rangka akselerasi investasi hilirisasi strategis.
 - Analisis *market intelligence* terhadap negara dan sektor prioritas promosi investasi di bidang hilirisasi.
 - *Announce flagship projects* di kegiatan/forum internasional.
 - Promosi investasi di bidang hilirisasi pada *event* Internasional yang diselenggarakan di dalam negeri.
 - Event promosi investasi sektor hilirisasi yang diselenggarakan oleh IIPC.
 - Penayangan promosi investasi di media internasional.
 - Penyelenggaraan kegiatan promosi terkait hilirisasi di daerah.
- d. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi, melalui:
 - Fasilitasi penyelesaian masalah di bidang hilirisasi berupa pengawasan pengendalian perizinan bidang hilirisasi.
 - Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di bidang hilirisasi.
- e. Meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal bidang hilirisasi, melalui:
 - Meningkatkan kualitas kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di bidang hilirisasi, melalui penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka kerja sama percepatan pelaksanaan berusaha di bidang hilirisasi.
 - Penguatan kerja sama pengembangan hilirisasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga penelitian, termasuk kerja sama standarisasi perizinan berusaha.

6. Meningkatkan tata kelola teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan penanaman modal yang berkualitas dan percepatan peningkatan penanaman modal, melalui:

- a. Peningkatan/Upgrade OSS-RBA 1.0 menjadi OSS-RBA 2.0.
- b. Peningkatan Integrasi Sistem di Kementerian/Lembaga di antaranya 5 K/L untuk Perizinan Dasar ke dalam Sistem OSS, yaitu: (1) Kementerian ATR/BPN (RDTR); (2) Kementerian Kehutanan (penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan); (3) Kementerian Lingkungan Hidup (AMDALNET); (4) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKPR-Laut); dan (5) Kementerian Pekerjaan Umum (SIMBG).
- c. Peningkatan Integrasi Sistem RDTR Digital (Daerah) ke dalam Sistem OSS. Terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) Jangka pendek, tambahan 42 RDTR terintegrasi dengan OSS sehingga total 320 RDTR terintegrasi OSS; (2) Jangka menengah, yaitu tambahan 200 RDTR terintegrasi dengan OSS sehingga total 520 RDTR terintegrasi OSS; (3) Jangka panjang, yaitu tambahan 300 RDTR terintegrasi dengan OSS sehingga total 830 RDTR terintegrasi OSS.
- d. Akomodasi sektor-sektor prioritas dan kawasan pusat pertumbuhan ke dalam sistem pelaporan realisasi penanaman modal untuk mendukung kemudahan dalam pemantauan perkembangan realisasi pada masing-masing sektor prioritas dan kawasan.
- e. Pengembangan fitur LKPM pada subsistem pengawasan OSS RBA yang dapat memberikan informasi nilai realisasi investasi yang akurat dan mampu mengirimkan notifikasi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi pelaporan LKPM
- f. Pengembangan *dashboard* terkait *live tracking* proses perizinan dan pelaporan realisasi investasi secara real time dalam mendorong transparansi dalam proses perizinan penanaman modal dan pelaporan realisasi investasi.
- g. Pengembangan website Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Hilirisasi/ BKPM dalam mendukung penyampaian informasi terkait Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Hilirisasi/BKPM.
- h. Pemeliharaan infrastruktur teknologi, seperti keamanan sistem, Data Center dan DRC yang mendukung OSS.
- i. Penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- j. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal.
- k. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, interoperabilitas, keamanan, dan operasional sistem informasi penanaman modal dan hilirisasi.
- l. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan, analisis, dan penyajian data penanaman modal dan hilirisasi.

Arah Kebijakan II: Meningkatkan kualitas iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal. Strategi untuk melaksanakan Arah Kebijakan II adalah:

1. Penyederhanaan perizinan berusaha, harmonisasi kebijakan lintas sektor, dan kebijakan insentif penanaman modal yang tepat sasaran, melalui:

- a. Evaluasi kebijakan insentif yang telah ada dan identifikasi peluang insentif baru sesuai perkembangan ekonomi global.
- b. Perubahan regulasi yang mendorong percepatan dan kemudahan proses perizinan berusaha, termasuk di kawasan pusat pertumbuhan.
- c. Penguatan ekosistem penanaman modal yang terintegrasi melalui penciptaan kepastian hukum melalui revisi UU Penanaman Modal, peraturan terkait Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM), dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI), serta Percepatan Penerbitan Pengganti PP No. 5 Tahun 2021.
- d. Optimalisasi Insentif Fiskal, utamanya *Tax Holiday* dengan melakukan penyelesaian revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang “Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan” dan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM tentang “Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan”
- e. Pengusulan rekomendasi teknis kebijakan sektor usaha dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga.
- f. Mengusulkan dan memberikan insentif khusus untuk sektor prioritas dan hilirisasi.

2. Mendorong UMKM naik kelas untuk meningkatkan kemandirian penanaman modal dalam negeri, melalui:

- a. Peningkatan daya saing UMKM melalui kebijakan yang mendorong partisipasi UMKM bermitra dengan Usaha Besar.
- b. Dukungan peningkatan kapasitas UMKM terutama dalam keterlibatan rantai pasok industri.
- c. Fasilitasi kemitraan antara Usaha besar dengan UMKM.

3. Mendukung pemetaan potensi penanaman modal di daerah untuk meningkatkan pemerataan penanaman modal, melalui:

- a. Penyusunan kebijakan potensi dan peluang investasi bidang hilirisasi di daerah.
- b. Diseminasi kebijakan bidang hilirisasi di daerah.
- c. Koordinasi dengan *stakeholders* terkait penambahan menu hilirisasi pada *website* Potensi Investasi Regional (PIR) sebagai salah satu media promosi digital.
- d. Koordinasi dan dukungan ke pemerintah daerah dalam melaksanakan pemetaan potensi dan peluang di daerah.
- e. Pengembangan potensi dan peluang investasi di daerah di antaranya (i) pembuatan dokumen promosi berupa potensi dan peluang investasi daerah; dan (ii) penyusunan peluang investasi di daerah yang siap ditawarkan kepada calon investor antara lain melalui program dukungan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK NF) Penanaman Modal.

4. Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan negara-negara potensial dan stakeholders terkait, serta memperkuat kesepakatan dan perjanjian yang dapat diimplementasikan secara efektif, guna menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan meningkatkan peran dalam Global Production Network (GPN) dan Global Value Chain (GVC), melalui:

- a. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan kesepakatan dan implementasi kerja sama bilateral, multilateral, dan regional di bidang penanaman modal.
- b. Menghadiri dan menyelenggarakan forum dan perundingan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional di bidang penanaman modal.
- c. Kemitraan dengan negara-negara di Afrika, Timor Leste, dan Timur Tengah untuk menarik potensi investasi dari Sovereign Wealth Fund (SWF).
- d. Pemanfaatan perjanjian dengan pelaku usaha untuk menarik investasi di sektor prioritas penanaman modal, seperti IA-CEPA untuk menarik klaster pendidikan dari Australia.
- e. Peningkatan fasilitasi outward investment dan penguatan kerja sama penanaman modal untuk pengembangan rantai nilai global.
- f. Meningkatkan penanaman modal dalam negeri melalui penguatan kinerja PTSP dan percepatan PPB di daerah, melalui Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga.

Arah Kebijakan III: Meningkatkan efektivitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Strategi untuk melaksanakan Arah Kebijakan III adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola penanaman modal, melalui:

- a. Penguatan layanan audit internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- b. Penguatan layanan perkantoran dan umum Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- c. Penguatan layanan perencanaan, anggaran dan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- d. Penguatan layanan pengadaan yang efisien, efektif, dan akuntabel
- e. Penguatan kelembagaan dan tata laksana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- f. Penguatan layanan hukum dan bantuan hukum Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- g. Penguatan layanan keprotokolan, tata usaha dan kearsipan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- h. Penguatan layanan hubungan masyarakat dan informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

2. Meningkatkan kinerja aparaturnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang berintegritas dan profesional untuk mendukung tata kelola dan pelayanan penanaman modal yang berkualitas, melalui:

- a. Peningkatan kapasitas SDM aparaturnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- b. Peningkatan budaya kerja dan profesionalisme SDM aparaturnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- c. Penguatan penata kelola penanaman modal, baik di pusat dan daerah.
- d. Peningkatan layanan manajemen SDM Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM.

Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi dalam Rancangan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 (1/4)

Kebutuhan kerangka regulasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 harus mampu mengakomodasi proses transformasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien. Berikut ini daftar regulasi yang dibutuhkan untuk dalam memperkuat kerangka regulasi yang telah ada:

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus	Kebutuhan untuk peningkatan ekosistem investasi di Kawasan Ekonomi Khusus khususnya pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal di KEK	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2	Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Kebutuhan untuk pelaksanaan mekanisme pemberian WIUP Prioritas melalui sistem OSS dan kriteria pemberian WIUP Prioritas kepada BUMN dan Swasta dalam rangka peningkatan ekosistem hilirisasi	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	Percepatan pembentukan ekosistem KBLBB dan memberikan payung hukum atas pemberian insentif	Kemenko Bidang Perekonomian	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4	Revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal	Evaluasi dan perubahan bidang usaha yang diprioritaskan, dialokasikan untuk UMKM, terbuka dengan persyaratan dan tertutup bagi penanaman modal.	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kerangka Regulasi dalam Rancangan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 (2/4)

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
5	Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Telah terbitnya PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) sehingga perlu dibuat peraturan teknis Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
6	Revisi Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Usaha Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Perlunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL serta evaluasi terhadap izin usaha wajib Amdal, UKL-UPL, atau SPPL paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	Kementerian Lingkungan Hidup
7	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Oleh Pemerintah Daerah	Perlunya pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam melakukan verifikasi terhadap penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	Kementerian Perdagangan
8	Revisi Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI	Penyempurnaan KBLI 2020 dan adopsi konsep ISIC v.5 pada KBLI 2025	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	Badan Pusat Statistik

Kerangka Regulasi dalam Rancangan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 (3/4)

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
9	Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 tahun 2024 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	Berakhirnya fasilitas Tax Holiday dan berlakunya Global Minimum Tax	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
10	Revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Perlunya peningkatan peran lembaga jaminan melalui pembaharuan dan penyederhanaan prosedur agar lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	Kementerian Keuangan
11	Rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pengembangan industri semikonduktor dan Kecerdasan Buatan	Belum adanya Peta Jalan Nasional dan pengembangan industri semikonduktor dan Kecerdasan Buatan	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	Kedeputian Hilirisasi Investasi Strategis
12	Rancangan Undang-Undang terkait Pembentukan Indonesia Financial Center yang bersifat <i>lex specialis</i>	Belum adanya regulasi dan dasar hukum yang kuat sebagai dasar pembentukan Indonesia Financial Center yang diinisiasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN)	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	Dewan Ekonomi Nasional
13	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2026-2045	Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012, RUPM periode 2012 – 2025 akan berakhir masa berlakunya pada akhir tahun 2025	Direktorat Perencanaan Makro Investasi	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kerangka Regulasi dalam Rancangan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 (4/4)

No.	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
14	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis	Belum adanya dasar hukum atas peta jalan (<i>roadmap</i>) hilirisasi investasi strategis yang telah disusun	Direktorat Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Perindustrian
15	Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Kapal Pesiar (<i>Cruiseship</i>)	Belum adanya peraturan terkait kapal pesiar dan peningkatan Penanaman Modal pada sektor pariwisata melalui perbaikan ekosistem dan penyediaan infrastruktur pariwisata moda kapal pesiar.	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan
16	Rancangan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)	Berdasarkan kajian yang dilakukan pada tahun 2024, perubahan UUPM perlu dilakukan terutama untuk penegasan kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai perpanjangan pemerintah dalam merumuskan RUPM dan kebijakan turunannya	Biro Hukum	Seluruh Kementerian/ Lembaga Teknis



Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 (1/2)

Tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKM berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi** dan **Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal**.

Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi

Tugas:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi,
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi,
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian,
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian,
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kerangka Kelembagaan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 (2/2)

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tugas:

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi:

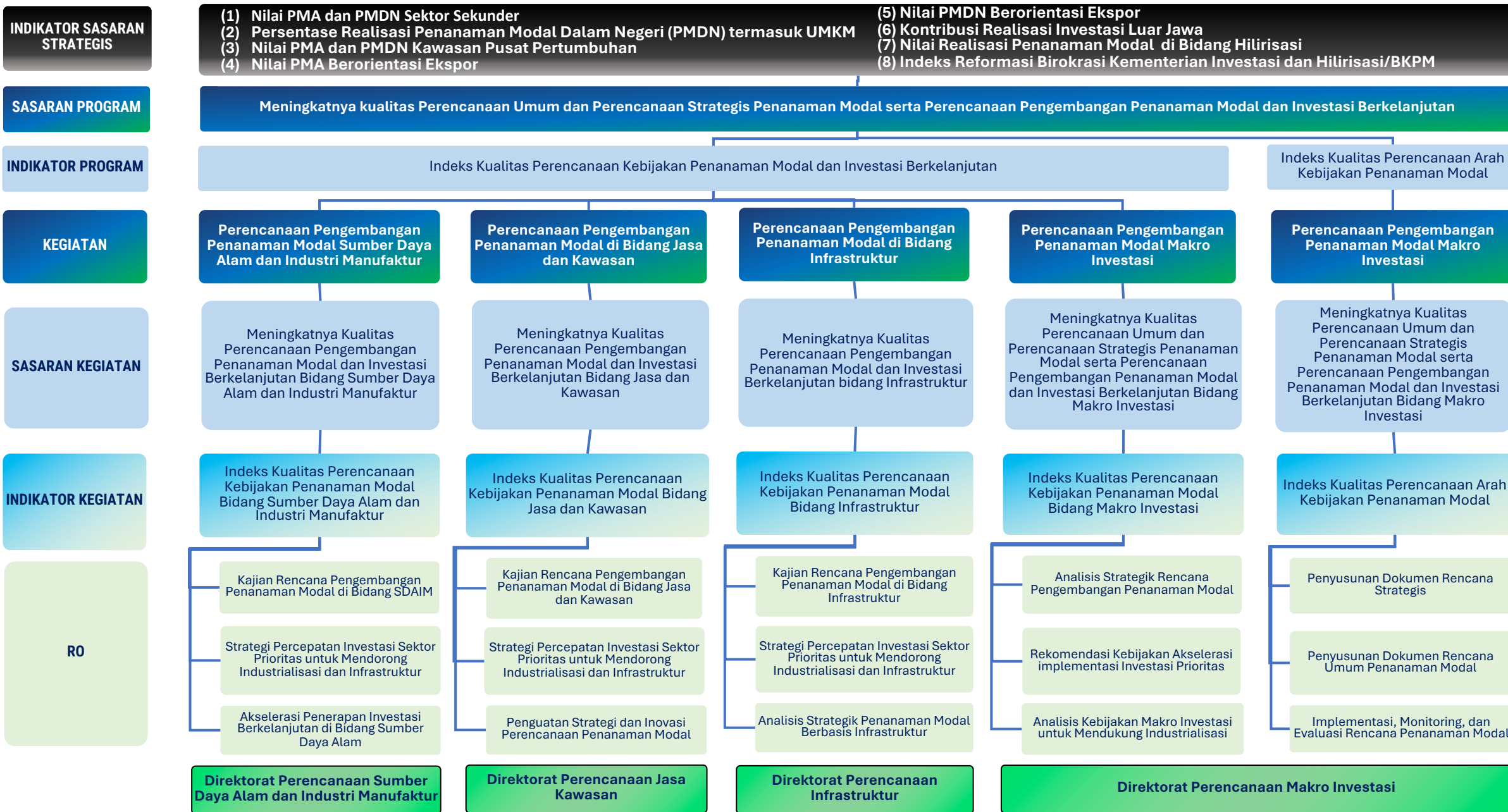
1. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional,
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal,
3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal,
4. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal,
5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha,
6. Pembuatan peta penanaman modal Indonesia,
7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal,
8. Sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal,
9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian,
10. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu,
11. Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia,
12. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal,
13. Koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis,
14. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM,
15. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM,
16. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM, dan
17. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kerangka Logis Program & Kegiatan per Kedeputan

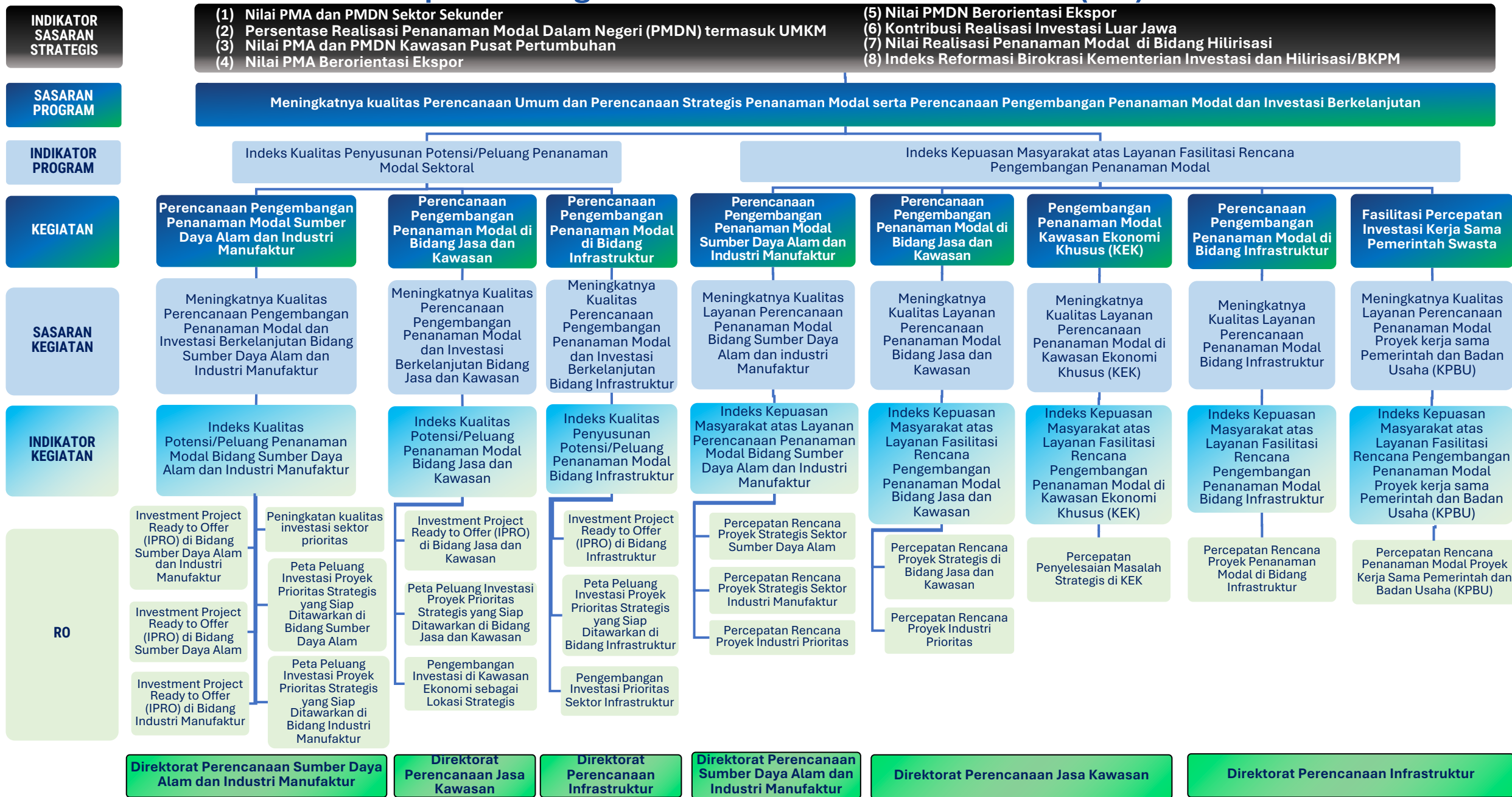
Kerangka Logis Program & Kegiatan

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (1/2)



Kerangka Logis Program & Kegiatan

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (1/2)



Kerangka Logis Program & Kegiatan Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

- (1) Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder
- (2) Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM
- (3) Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan
- (4) Nilai PMA Berorientasi Ekspor

- (5) Nilai PMDN Berorientasi Ekspor
- (6) Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
- (7) Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi
- (8) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya efektivitas Promosi Penanaman Modal

INDIKATOR PROGRAM

Nilai Rencana Penanaman Modal

Persentase investor potensial yang memperoleh Nomor Induk Berusaha dan/atau Nomor Kegiatan Berusaha

KEGIATAN

Promosi Wilayah
Amerika dan Eropa

Promosi Wilayah Asia
Timur, Asia Selatan,
Timur Tengah dan Afrika

Promosi Wilayah Asia
Tenggara, Australia,
Selandia Baru dan
Pasifik

Peningkatan Kualitas
Strategi Promosi di
Bidang
Penanaman Modal

Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang
Penanaman Modal

SASARAN KEGIATAN

Terwujudnya kualitas
Promosi yang Efektif di
Wilayah Amerika dan
Eropa

Terwujudnya kualitas
Promosi yang Efektif di
Wilayah Asia Timur, Asia
Selatan, Timur Tengah, dan
Afrika

Terwujudnya kualitas
Promosi yang Efektif di
Wilayah Asia Tenggara,
Australia, Selandia Baru,
dan Pasifik

Tersedianya kualitas
promosi yang efektif di
dalam negeri

Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas

Tersedianya promosi
investasi sektor
hilirisasi yang efektif

INDIKATOR KEGIATAN

Nilai Rencana
Penanaman Modal di
Wilayah Amerika dan
Eropa

Nilai Rencana
Penanaman Modal di
Wilayah Asia Timur, Asia
Selatan, Timur Tengah,
dan Afrika

Nilai Rencana
Penanaman Modal di
Wilayah Asia Tenggara,
Australia, Selandia Baru,
dan Pasifik

Nilai rencana
penanaman modal dari
promosi Penanaman
Modal Dalam Negeri

Investor potensial yang
memperoleh Nomor
Induk Berusaha (NIB)
dan/atau Nomor
Kegiatan Usaha (NKU)

Persentase perusahaan
asing yang berhasil
difasilitasi untuk
melakukan relokasi dan
diversifikasi geografis ke
Indonesia

Indeks kualitas
strategi promosi
penanaman modal

Nilai Rencana
Penanaman Modal di
sektor hilirisasi

RO

Pemasaran Investasi
Berdasarkan Sektor
Pendukung Prioritas
Nasional di Wilayah
Amerika dan Eropa

Promosi penanaman
modal dalam forum
internasional di Wilayah
Amerika dan Eropa

Promosi Kegiatan di
Kawasan Nasional IKN di
Wilayah Amerika dan
Eropa

Pemasaran Investasi
Berdasarkan Sektor
Pendukung Prioritas
Nasional di Wilayah Asia
Timur, Asia Selatan, Timur
Tengah dan Afrika

Promosi penanaman
modal dalam Forum
Internasional di Wilayah
Asia Timur, Asia Selatan,
Timur Tengah dan Afrika

Promosi Kegiatan di
Kawasan Nasional IKN di
Wilayah Asia Timur, Asia
Selatan, Timur Tengah
dan Afrika

Pemasaran Investasi
Berdasarkan Sektor
Pendukung Prioritas
Nasional di Wilayah Asia
Tenggara, Australia,
Selandia Baru dan Pasifik

Promosi penanaman
modal dalam forum
internasional di Wilayah
Asia Tenggara, Australia,
Selandia Baru dan Pasifik

Promosi Kegiatan di
Kawasan Nasional IKN di
Wilayah Asia Timur, Asia
Selatan, Timur Tengah
dan Afrika

Pemasaran Investasi
Berdasarkan Sektor
Pendukung Prioritas
Nasional di Dalam
Negeri

Indonesian Investment
Promotion Center (IIPC)
Bahan Informasi
Potensi Penanaman
Modal

Fasilitasi Relokasi
Perusahaan Asing ke
Indonesia dan
Peningkatan PMDN

Analisis negara target
dan negara pesaing
Analisis Market
Intelligence (MI)
Negara dan Sektor
Prioritas Promosi
Investasi

Promosi Investasi
Sektor Hilirisasi

Direktorat Promosi
Wilayah Amerika dan
Eropa

Direktorat Promosi
Wilayah Asia Timur, Asia
Selatan, Timur Tengah
dan Afrika

Direktorat Promosi
Wilayah Asia Tenggara,
Australia, Selandia Baru
dan Pasifik

Direktorat
Pengembangan
Promosi

Direktorat Pengembangan Promosi

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (1/3)

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

- (1) Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder
- (2) Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM
- (3) Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan
- (4) Nilai PMA Berorientasi Ekspor
- (5) Nilai PMDN Berorientasi Ekspor
- (6) Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
- (7) Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi
- (8) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

SASARAN PROGRAM

Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif

INDIKATOR PROGRAM

Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi

KEGIATAN

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V

SASARAN KEGIATAN

Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah I

Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah II

Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah III

Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah IV

Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah V

INDIKATOR KEGIATAN

Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah I berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi

Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah II berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi

Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah III berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi

Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah IV berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi

Persentase proyek yang dipantau perkembangan realisasinya pada 38 Provinsi dalam rangka Dekonsentrasi

Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah V berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi

RO

- Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah I
- Asistensi pendampingan konsultasi subsistem pengawasan pada sistem online single submission
- Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi
- Fasilitasi Eksekusi Realisasi Investasi Bagi Perusahaan Penerima Fasilitas Penanaman Modal

- Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah II
- Pengembangan Realisasi Investasi di Wilayah- wilayah Tertentu

- Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah III
- Pengawasan Percepatan Realisasi Investasi Hijau Berkelanjutan
- Pengawasan Realisasi Penanaman Modal di Kawasan Pusat Pertumbuhan
- Eksekusi Proyek Wilayah Barat Yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi

- Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah IV
- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Proyek Strategis Tahap Konstruksi
- Eksekusi Proyek Wilayah Timur Yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi

- Pemantauan Perkembangan Realisasi Investasi di 38 Provinsi dalam rangka Dekonsentrasi

- Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah V
- Pemantauan dan Evaluasi Investasi Hilirisasi
- Fasilitasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Satgas Percepatan Investasi

Direktorat Wilayah I

Direktorat Wilayah II

Direktorat Wilayah III

Direktorat Wilayah IV

Direktorat Wilayah V

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (2/3)

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

- (1) Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder
- (2) Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM
- (3) Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan
- (4) Nilai PMA Berorientasi Ekspor

- (5) Nilai PMDN Berorientasi Ekspor
- (6) Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
- (7) Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi
- (8) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

SASARAN
PROGRAM

Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif

INDIKATOR
PROGRAM

Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko

KEGIATAN

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal Wilayah I

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal Wilayah II

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal Wilayah III

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal Wilayah IV

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal Wilayah V

SASARAN
KEGIATAN

Terwujudnya Pengendalian dan
Pelaksanaan Penanaman Modal dan
Hilirisasi yang Efektif di Wilayah I

Terwujudnya Pengendalian dan
Pelaksanaan Penanaman Modal dan
Hilirisasi yang Efektif di Wilayah II

Terwujudnya Pengendalian dan
Pelaksanaan Penanaman Modal dan
Hilirisasi yang Efektif di Wilayah III

Terwujudnya Pengendalian dan
Pelaksanaan Penanaman Modal dan
Hilirisasi yang Efektif di Wilayah IV

Terwujudnya Pengendalian dan
Pelaksanaan Penanaman Modal dan
Hilirisasi yang Efektif di Wilayah V

INDIKATOR
KEGIATAN

Persentase pelaksanaan pengawasan
perkembangan realisasi penanaman
modal berusaha berbasis risiko di
Wilayah I

Persentase pelaksanaan
pengawasan perkembangan realisasi
penanaman modal berusaha
berbasis risiko di Wilayah II

Persentase pelaksanaan pengawasan
perkembangan realisasi penanaman
modal berusaha berbasis risiko di
Wilayah III

Persentase pelaksanaan pengawasan
perkembangan realisasi penanaman
modal berusaha berbasis risiko di
Wilayah IV

Persentase pelaksanaan pengawasan
perkembangan realisasi penanaman
modal berusaha berbasis risiko di
Wilayah V

RO

Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah I

Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah II

Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah III

Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah IV

Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah V

Verifikasi Pelaksanaan Pengawasan
Berusaha Berbasis Risiko

Direktorat Wilayah I

Direktorat Wilayah II

Direktorat Wilayah III

Direktorat Wilayah IV

Direktorat Wilayah V

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (3/3)

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

- (1) Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder
- (2) Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM
- (3) Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan
- (4) Nilai PMA Berorientasi Ekspor

- (5) Nilai PMDN Berorientasi Ekspor
- (6) Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
- (7) Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi
- (8) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

SASARAN
PROGRAM

Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif

INDIKATOR
PROGRAM

Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya

KEGIATAN

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V

SASARAN
KEGIATAN

Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah I

Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah II

Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah III

Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah IV

Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah V

INDIKATOR
KEGIATAN

Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah I

Persentase fasilitasi badan usaha Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat diselesaikan permasalahannya

Persentase Fasilitasi Realisasi Investasi Sektor Industri Padat Karya

Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah II

Persentase fasilitasi pengembangan investasi berorientasi ekspor

Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah III

Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah IV

Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah V

RO

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah I

Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN

Fasilitasi realisasi investasi sektor industri padat karya

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah II

Fasilitasi Pengembangan investasi Berorientasi Ekspor

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah III

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah IV

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah V

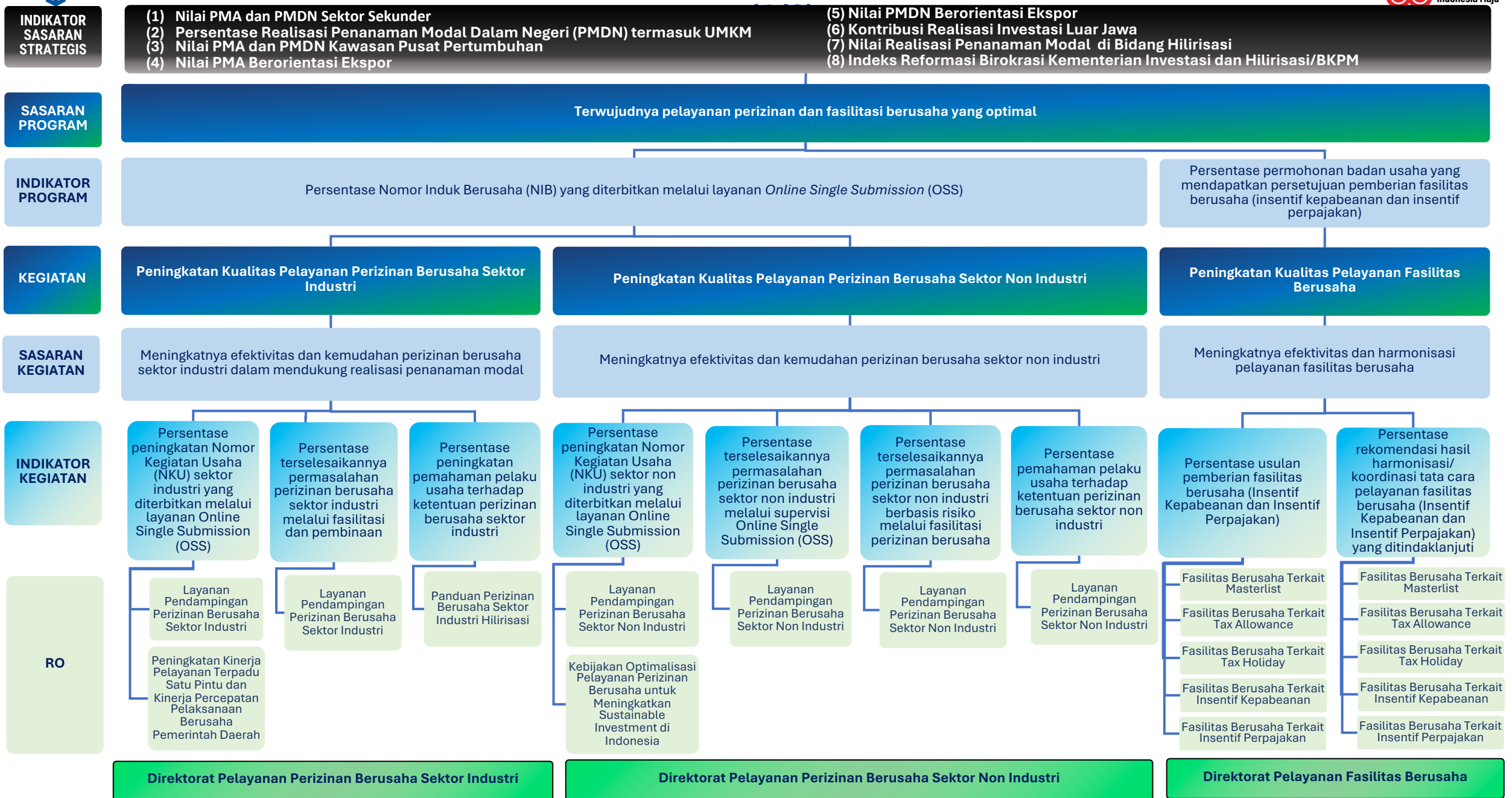
Direktorat Wilayah I

Direktorat Wilayah II

Direktorat Wilayah III

Direktorat Wilayah IV

Direktorat Wilayah V



INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

- (1) Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder
- (2) Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM
- (3) Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan
- (4) Nilai PMA Berorientasi Ekspor

- (5) Nilai PMDN Berorientasi Ekspor
- (6) Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
- (7) Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi
- (8) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

SASARAN PROGRAM

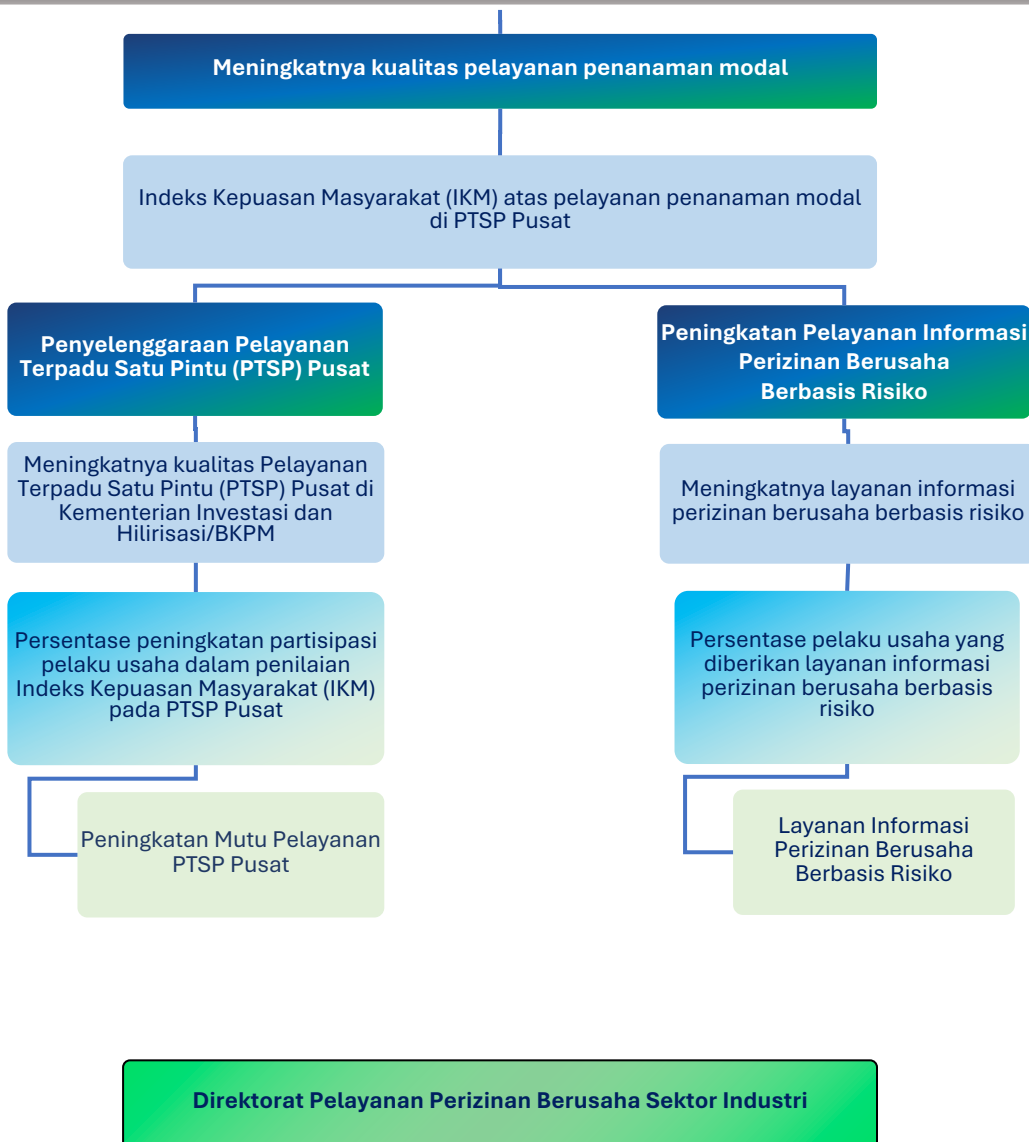
INDIKATOR
PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR
KEGIATAN

RO



Kerangka Logis Program & Kegiatan

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (1/4)

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

- (1) Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder
- (2) Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM
- (3) Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan
- (4) Nilai PMA Berorientasi Ekspor

- (5) Nilai PMDN Berorientasi Ekspor
- (6) Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
- (7) Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi
- (8) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis

INDIKATOR PROGRAM

Persentase rencana aksi strategi dan tata kelola di bidang hilirisasi yang ditindaklanjuti

KEGIATAN

Pengembangan Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Investasi strategis

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya kualitas susunan Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Investasi Strategis

INDIKATOR KEGIATAN

Persentase rencana aksi strategi dan tata kelola bidang hilirisasi yang ditindaklanjuti

RO

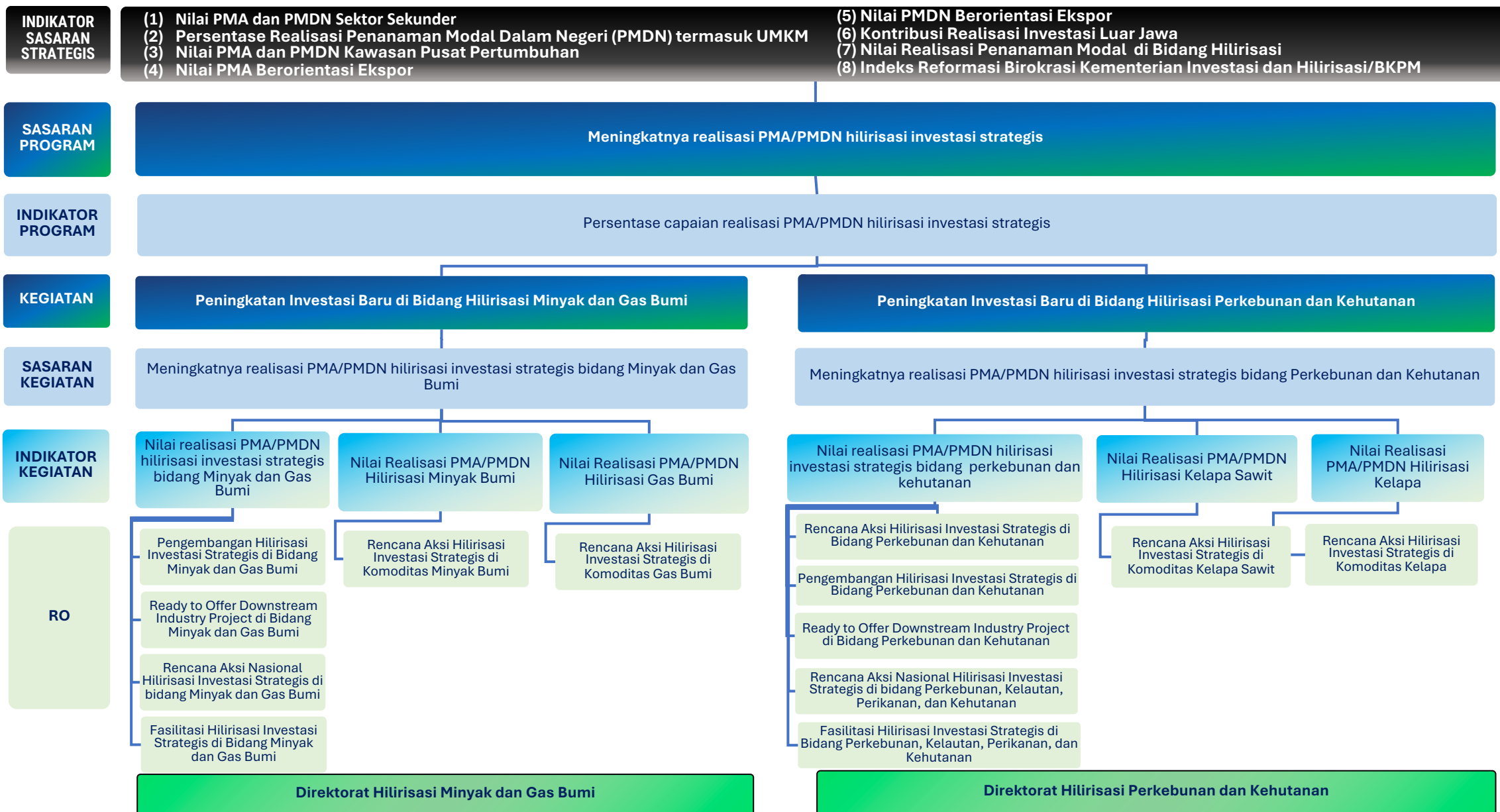
Rencana Aksi Strategi di Bidang Hilirisasi Investasi Strategis

Fasilitasi Permasalahan Tata Kelola di Bidang Hilirisasi Investasi Strategis

Direktorat Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi

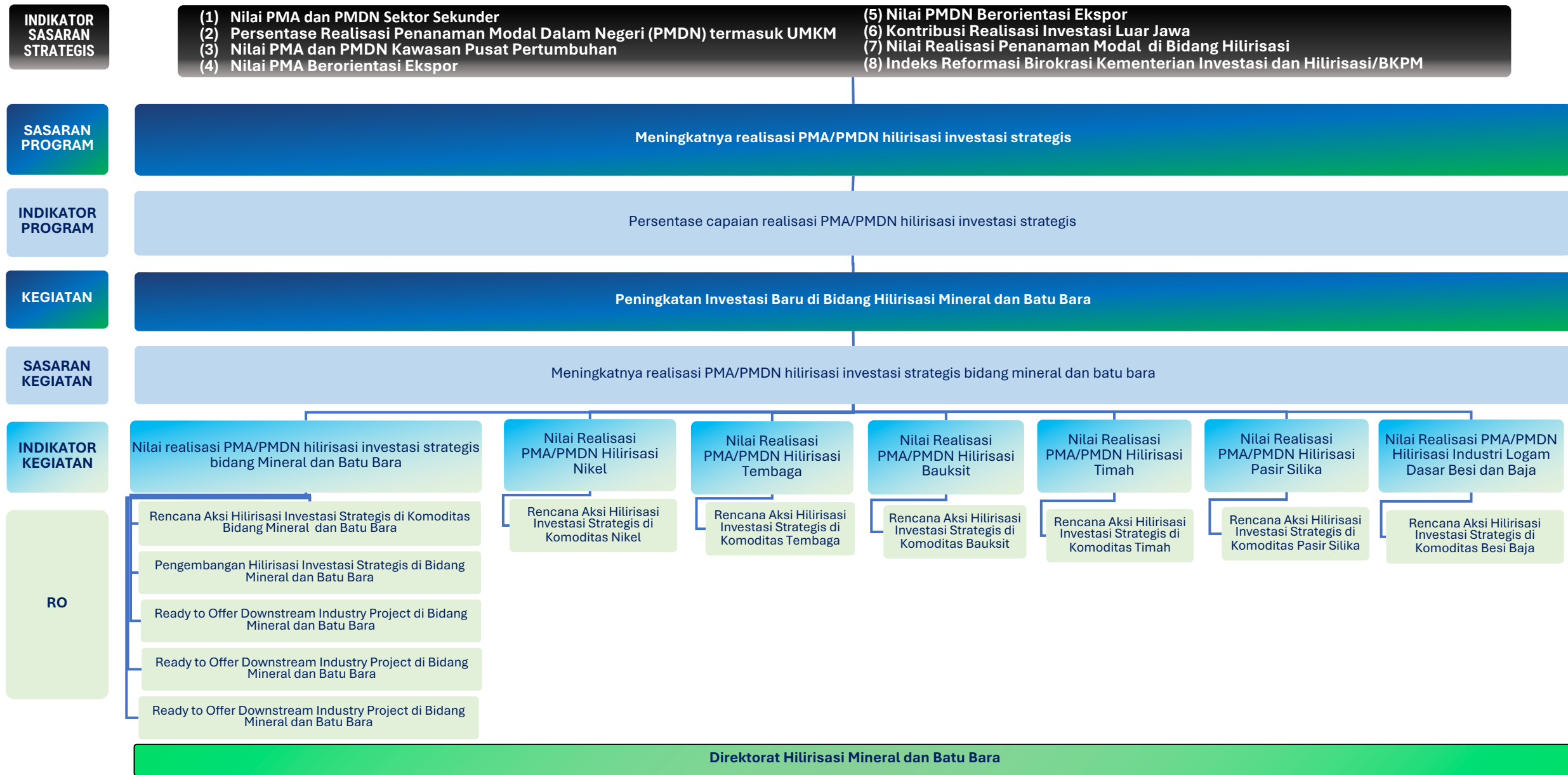
Kerangka Logis Program & Kegiatan

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (2/4)



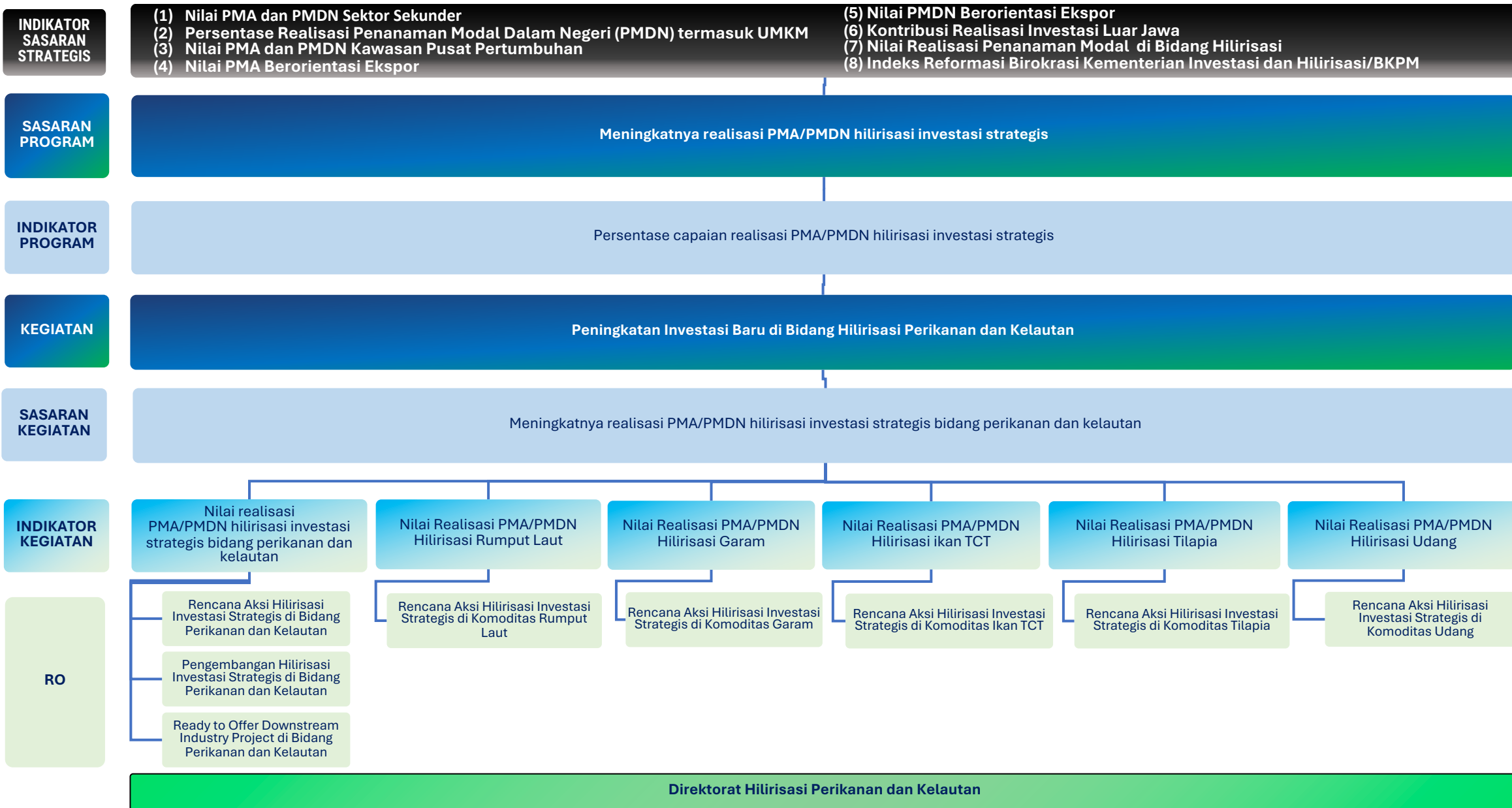
Kerangka Logis Program & Kegiatan

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (3/4)



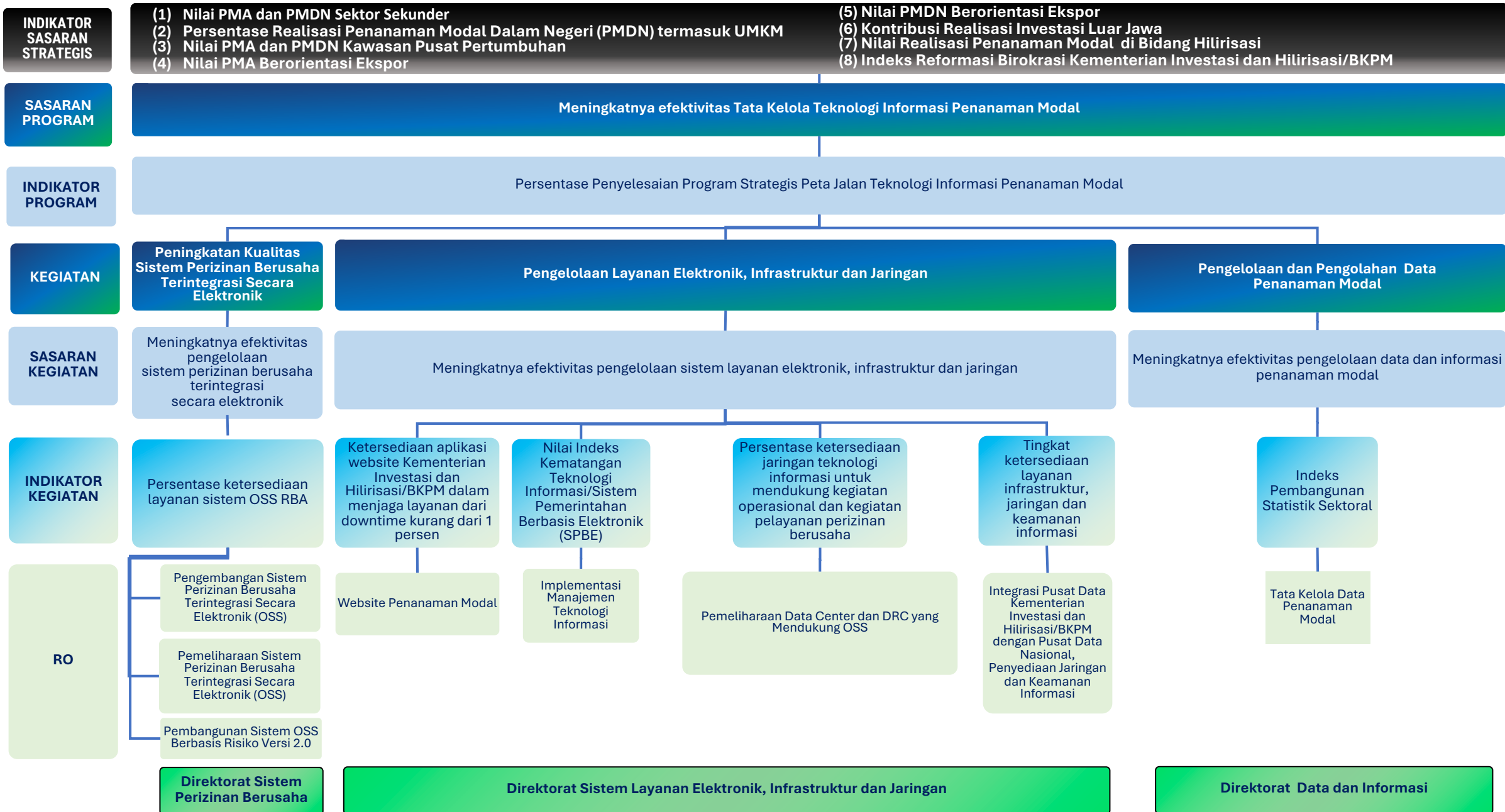
Kerangka Logis Program & Kegiatan

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (4/4)



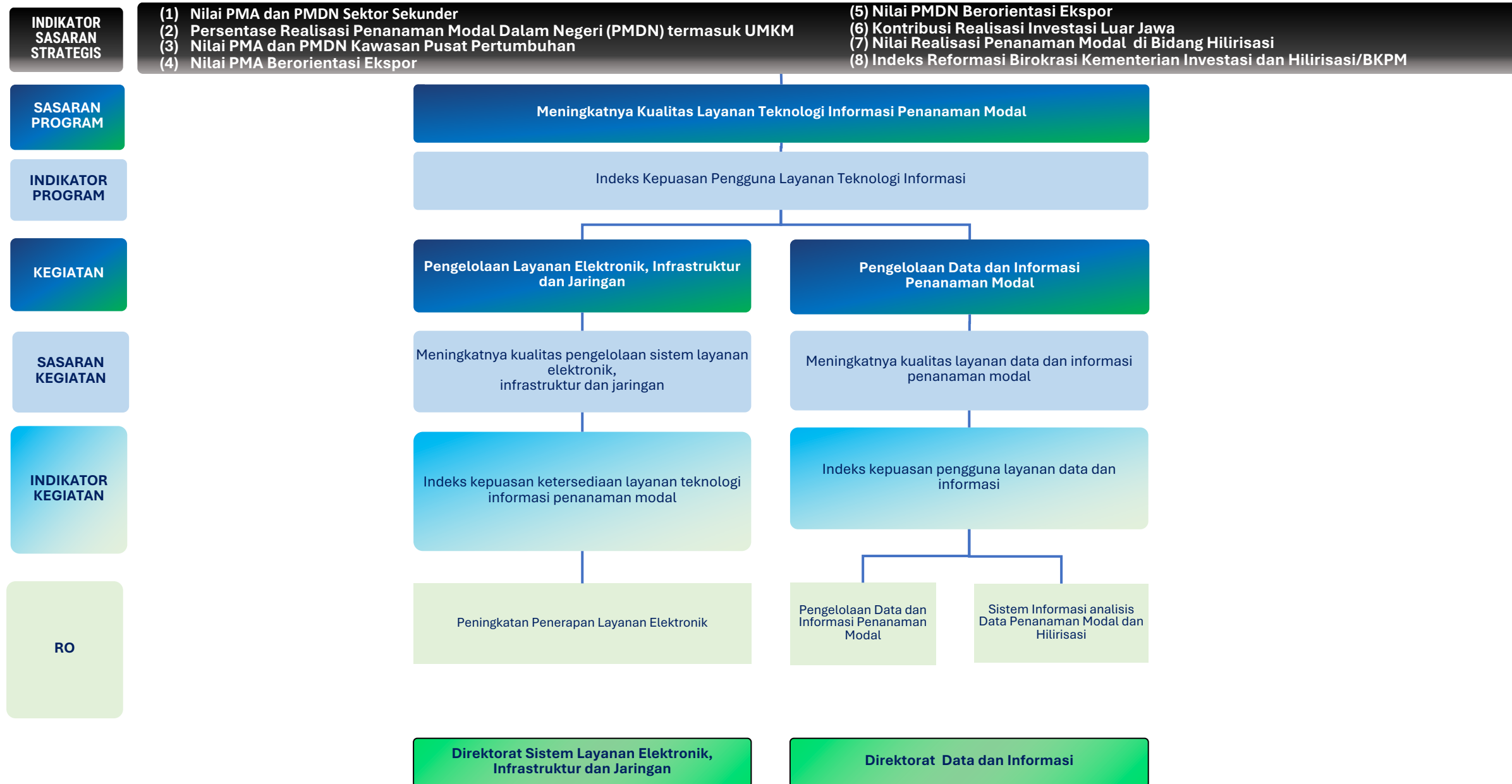
Kerangka Logis Program & Kegiatan

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (1/2)



Kerangka Logis Program & Kegiatan

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (2/2)



Kerangka Logis Program & Kegiatan

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

- (1) Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder
- (2) Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM
- (3) Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan
- (4) Nilai PMA Berorientasi Ekspor

- (5) Nilai PMDN Berorientasi Ekspor
- (6) Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
- (7) Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi
- (8) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal

INDIKATOR PROGRAM

Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti

Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM

Persentase Peningkatan Pemanfaatan Profil Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah

KEGIATAN

Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal

Pemberdayaan Usaha Nasional

Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya kualitas kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

Meningkatnya kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM

Meningkatnya kualitas fasilitasi Kemitraan Antara PMA/PMDN dengan UMKM

Meningkatnya kualitas potensi penanaman modal dan hilirisasi di daerah

INDIKATOR KEGIATAN

Persentase rekomendasi peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi kebijakan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko di pusat dan di daerah yang ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi terkait sinkronisasi kebijakan investasi yang ditindaklanjuti

Persentase Kebijakan Ekosistem Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing

Persentase kesepakatan kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar PMA/PMDN yang difasilitasi terhadap komitmen kemitraan dari Usaha Besar PMA/PMDN

Persentase Pelaku UMKM yang telah dilakukan penguatan kapasitas untuk mendukung rantai pasok Usaha Besar (UB)

Persentase daerah yang data potensi penanaman modal dan hilirisasi yang termutakhirkan sesuai kriteria

RO

Peningkatan Daya Saing Investasi

Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah

Sinkronisasi Kebijakan Investasi

Transformasi Kebijakan Ekosistem Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing

Kemitraan Usaha Nasional

Data Perusahaan PMA/PMDN yang Wajib Bermitra dan Pelaku UMKM di Daerah yang Siap Dimitrakan

Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok

Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Nasional

Fasilitasi Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah

Pengemasan Peluang Penanaman Modal di Daerah yang Layak Investasi

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal Bidang Hilirisasi di Daerah

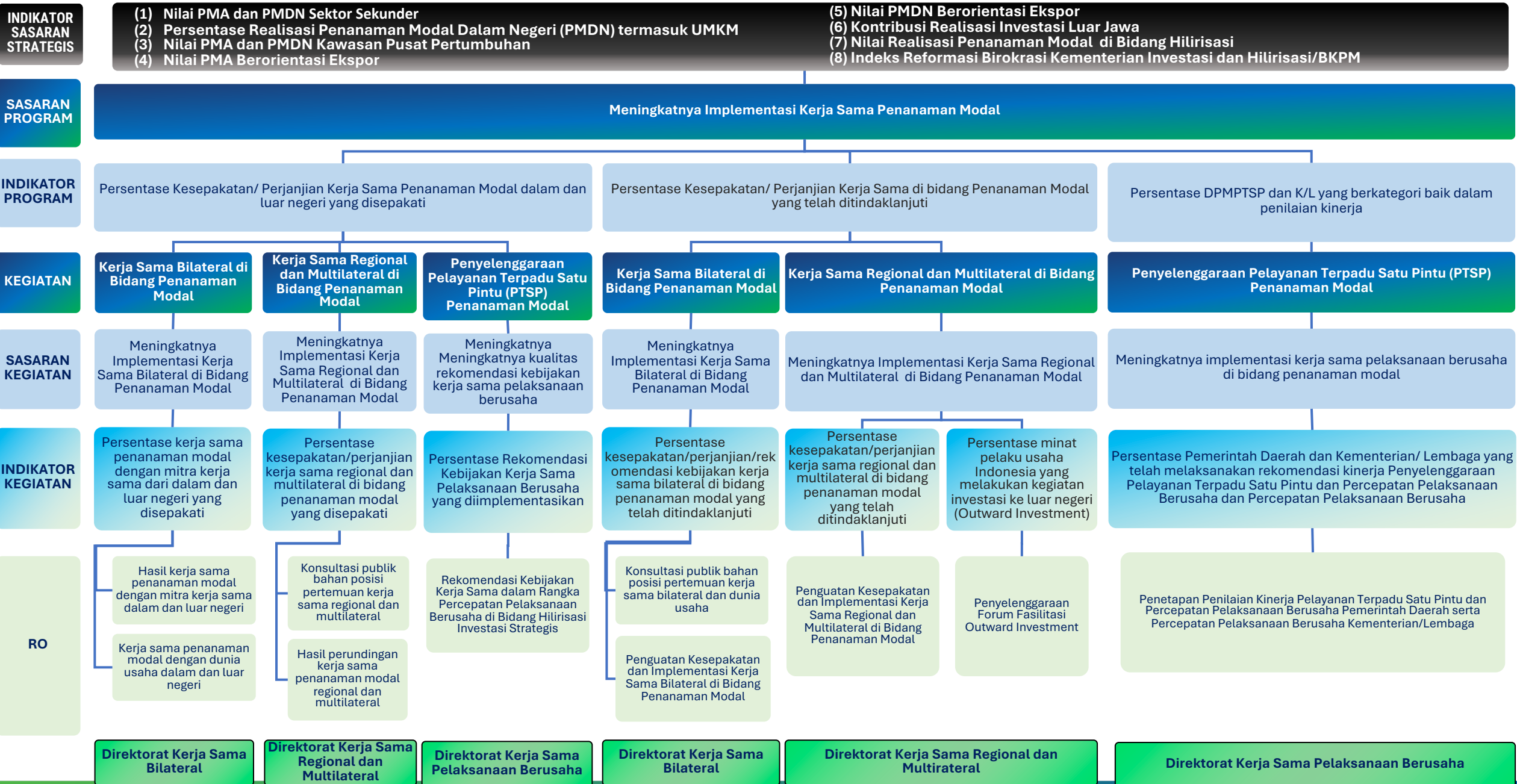
Direktorat Deregulasi Penanaman Modal

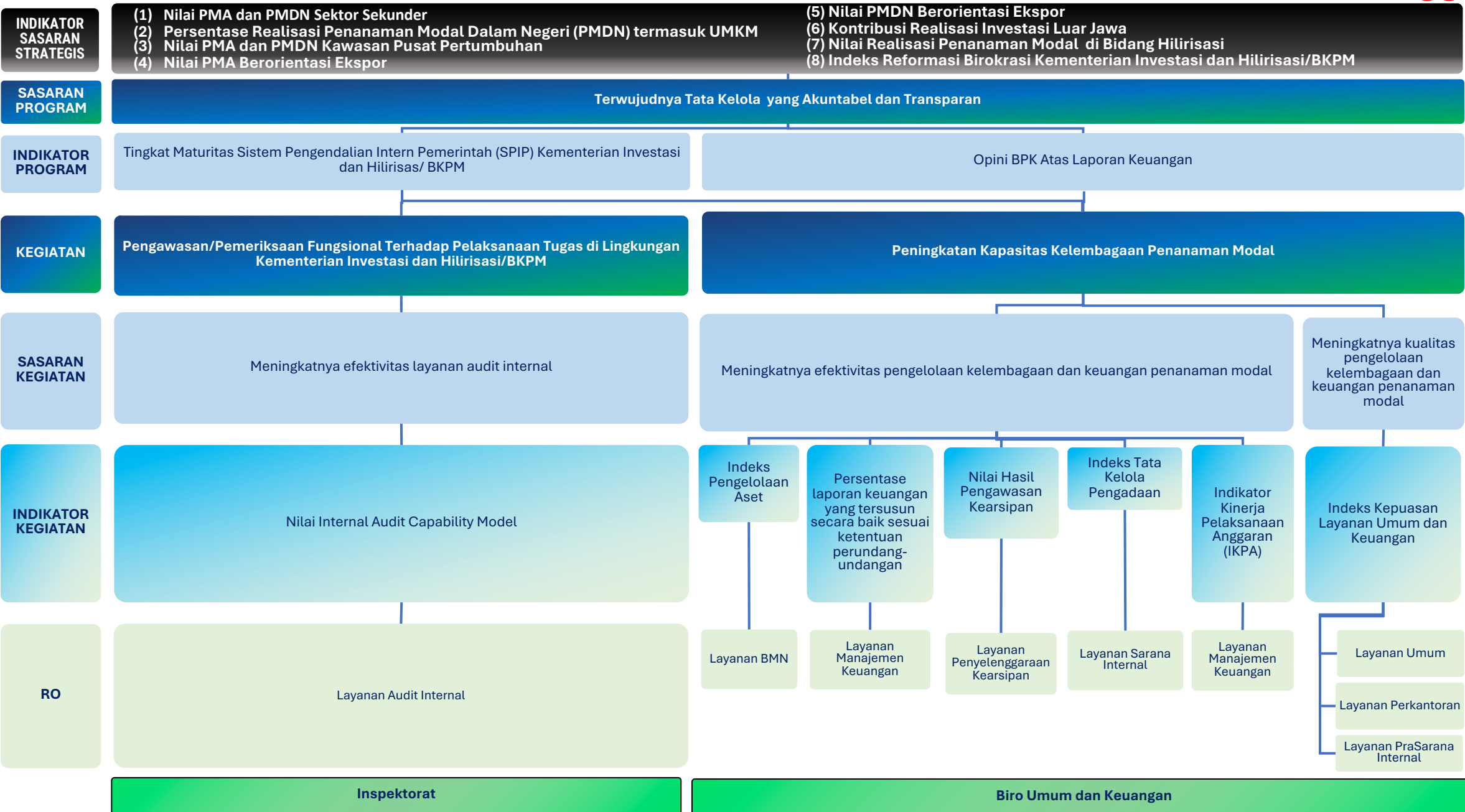
Direktorat Pemberdayaan Usaha

Direktorat Pengembangan Potensi Daerah

Kerangka Logis Program & Kegiatan

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal





Kerangka Logis Program & Kegiatan

Sekretariat Utama/Sekretariat Kementerian (2/3)



Kerangka Logis Program & Kegiatan

Sekretariat Utama/Sekretariat Kementerian (3/3)

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

- (1) Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder
- (2) Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM
- (3) Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan
- (4) Nilai PMA Berorientasi Ekspor
- (5) Nilai PMDN Berorientasi Ekspor
- (6) Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
- (7) Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi
- (8) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

SASARAN PROGRAM

Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional

Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Berakhlak dan Profesional

INDIKATOR PROGRAM

Nilai Evaluasi Kelembagaan

Nilai Sistem Merit

KEGIATAN

Pembinaan Penata Kelola
Penanaman Modal

Penatakelolaan Sumber Daya
Manusia dan Organisasi

Penatakelolaan Sumber Daya Manusia dan
Organisasi

Pengembangan Sumber Daya Manusia

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya
kualitas
pembinaan
jabatan
fungsional
penanaman
modal

Meningkatnya
implementasi
dan efektivitas
pembinaan
jabatan
fungsional
penanaman
modal

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas
lembaga melalui evaluasi dan
penataan organisasi pemerintah yang
tepat fungsi, tepat proses, dan tepat
ukuran

Meningkatnya kualitas layanan sumber daya
manusia berbasis meritokrasi

Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan
aparatur daerah bidang penanaman modal dan hilirisasi

INDIKATOR KEGIATAN

Indeks kepuasan
layanan
pembinaan
jabatan
fungsional
penanaman
modal

Persentase Pembinaan
Jabatan
Fungsional
Penata Kelola
Penanaman
Modal yang
ditindaklanjuti

Persentase
Penyederhanaan
Struktur
Organisasi
(PSO)

Nilai Penerapan
Penyesuaian
Sistem Kerja

Indeks kepuasan layanan sumber daya
manusia dan organisasi

Persentase ASN Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan fungsional, struktural
dan teknis serta memiliki sertifikat
kelulusan

Persentase ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan bidang
penanaman modal dan hilirisasi di
pusat dan daerah yang lulus sesuai
dengan kriteria

RO

Layanan
Standarisasi Profesi
dan Sumber Daya
Manusia Jabatan
Fungsional Penata
Kelola Penanaman
Modal

Layanan
Pembinaan
Jabatan
Fungsional
Penata Kelola
Penanaman
Modal

Layanan
Reformasi Kinerja

Layanan Organisasi
dan Tata Kelola
Internal

Layanan Manajemen SDM

Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Diklat Bidang Penanaman Modal
Internal dan Eksternal

Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional Penanaman Modal

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan